

# **EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN SUPREMASI HAK ASASI MANUSIA**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar  
Sarjana Hukum Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NAMA : HASRIASMAN RAHMAT. H

NIM : 10300106021

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2012**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 April 2013

Penyusun,

**HASRIASMAN RACHMAT H**

NIM: 10300106021

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara Hasriasman, Nim: 10300106021 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Euthanasia (suntik mati ) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi HAM”** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 15 Desember 2012

Penulis,

Hasriasman Rahmat. H  
Nim. 10300106021

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
Nip. 19621016199003 1 003

Dr. Kasjim Salenda, SH.M.Th.i  
Nip. 196000817199203 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ **Ethanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi HAM**” yang disusun oleh **Hasriasman Rachmat .H**, NIM: 10300106021, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 M, bertepatan dengan 19 Muharram 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Manajemen ( dengan beberapa perbaikan ).

Makassar, 15 Desember 2011 M

19 Muharram 1433 H

## DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	( ..... )
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	( ..... )
Munaqisy I	: Prof. Dr. Sabri samin, M.Ag	( ..... )
Munaqisy II	: Dr. Muhammad Sabri AR, M.Ag	( ..... )
Pembimbing I	: Prof.Dr.Darussalam Syamsuddin,M.Ag( ..... )	
Pembimbing II	: Dr. Kasjim Salenda, SH. M. Th.i	( ..... )

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Ali Parman, MA**  
NIP: 195704141986031003

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, serta shalawat dan salam dilimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas selesainya skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam untuk memperoleh gelar sarjana. Keseluruhan isinya mengandung hasil penelitian pustaka dan pembahasan yang berjudul

Penyusunan skripsi tentunya tidak lepas dari berbagai kesulitan dan hambatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai tahap penyelesaian. Namaun berkat bantuan dari berbagai pihak, khususnya bimbingan dan pengetahuan dari staf dosen jurusan HPK UIN Alauddin Makassar, akhirnya kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua serta saudara-saudara yang tercinta yang dengan kesabarannya telah member bantuan moral dan materiil kepada kami
2. Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS.
3. Bapak Dekan fakultas Syariah dan Hukum beserta staf.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawati M. Si sebagai ketua prodi jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Serta bapak dan ibu dosen jurusan HPK yang telah mencurahkan waktu dan ilmunya dalam membimbing dan mengajar penulis selama mengikuti aktifitas perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin M. Ag (pembimbing 1), dan Bapak Dr. Kasjim Salenda SH. M. Th.i (pembimbing 2) sebagai tim pembimbing penulis.
6. Teman-teman fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu terlaksananya penulisan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku (Sapil, Alan, jufri dan HPK 06) terima kasih atas kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun pengalaman sehingga proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya saya berharap kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar 23 April 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Defenisi General dan Ruang Lingkup Penelitian .....	8
D. Metodologi Penelitian .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
F. Garis Besar Isi .....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM EUTHANASIA	
A. Pengertian Euthanasia .....	15
B. Macam-macam Euthanasia.....	17
C. Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukan Euthanasia.....	19
D. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran .....	21
BAB III. EUTHANASIA DALAM HUKUM POSITIF	
A. Aspek Hukum Pidana (KUHP) Euthanasia .....	38
B. Analisis Undang-undang Hak Asasi Manusia Terhadap Euthanasia .....	41
C. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia (HAM) .....	46
BAB IV. EUTHANASIA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam.....	51
B. Hubungan Euthanasia dengan Jarimah.....	57
C. Pandangan Syariat Islam .....	63
D. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Euthanasia .....	67
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	76
B. Implikasi Penelitian.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79

## LAMPIRAN



## ABSTRAK

**Nama** : HASRIASMAN RAHMAT. H  
**Nim** : 10300106021  
**Judul** : Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Supremasi Hak Asasi Manusia.

---

Pemasalahan pokok dalam skripsi ini adalah studi tentang salah satu aspek dari Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi Hak Asasi Manusia. Adapun tujuannya adalah, Bagaimana kedudukan pelaku dan hukum Euthanasia dalam hukum pidana Islam? Bagaimana *Euthanasia* menurut hak asasi manusia?

Masalah ini dilihat dengan pendekatan dalam metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan dari subjek atau perilaku yang diamati selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil yang benar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pendekatan *library research*. Kemudian penulis mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan hukum normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Euthanasia menjadi hal yang diperdebatkan diberbagai belahan dunia, permasalahannya berpangkal pada apakah tindakan Euthanasia itu melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan norma agama atau tidak lain bagaimana dengan Negara yang telah melegalkan Euthanasia melalui peraturan perundangannya, lalu upayaupaya apa yang dilakukan untuk mensosialisasikan tindakan Euthanasia ini agar diketahui oleh kalayak ramai, aspek-aspek dari Euthanasia yang melanggar Hak Asasi Manusia. Euthanasia dalam bentuk apapun aktif maupun pasif keduanya mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia terutama mengenai pelanggaran hak hidup seorang pasien, karena bagaimanapun di dunia ini tidak dikenal hak untuk mati, karena kematian adalah hak mutlak dari pemberi kehidupan yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kedepan perlu diadakan seminar-seminar untuk memberikan informasi yang lebih luas tentang Euthanasia dan aspek-aspek pelanggaran terutama kepada keluarga pasien, dokter, penegak hukum dan masyarakat luas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia pada pelaksanaan Euthanasia.

Euthanasia dalam KUHP dan Kode Etik Kedokteran. Dalam pasal 344 KUHP dinyatakan: “barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamalamanya dua belas tahun. Berdasarkan pasal ini seorang dokter bisa dituntut bila melakukan euthanasia, walaupun atas permintaan pasien dan keluarga yang bersangkutan. Bagi dokter yang melakukan euthanasia bisa diberhentikan dari jabatannya, karena melanggar kode etik kedokteran. Menghentikan perawatan/ pengobatan, artinya membawa pasien pulang ke rumah. Membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah swt.

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia sebagai makhluk yang mendapat amanat dan tugas sebagai pengelola bumi (*khalifah fi al-ard*). Eksistensinya di atas bumi ini, menjadi suatu keniscayaan selama bumi masih ada. Untuk tugas dan fungsi itulah, maka Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan melengkapi kodratnya dengan naluri ketertarikan kepada lawan jenisnya, sebagaimana firmanNya Q.S. Al-Imran/3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

*Dijadikan terasah indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference* (Bandung: Sygma Publishing, 2008), h. 99.

Naluri itulah yang kemudian mendorong mereka untuk hidup bersama dan dari kehidupan inilah kemudian terlahir generasi penerus estafet kekhalifahan di atas bumi ini. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna ciptaannya, dibekali seperangkat media agar mampu melaksanakan tugas kekhalifahan secara baik di muka bumi ini yang dihuni baik oleh manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya. Naluri dan akal adalah dua perangkat yang dibutuhkan manusia agar mampu memikirkan dan membedakan yang baik dan yang buruk. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang serba teratur dan harmonis menjadi suatu keniscayaan dalam hidup mereka.

Pada masyarakat modern seperti masyarakat di negara barat, kebutuhan dan aspirasi masyarakat menempati kedudukan yang tinggi sehingga berdasarkan itu suatu produk hukum baru di buat. Oleh sebab itu, dapat digambarkan bahwa apabila terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat, maka interpretasi terhadap hukum juga dapat berubah. Perbuatan yang dahulu di anggap tabuh, pada waktu tertentu pandangan tersebut bisa saja berubah menjadi serba boleh. Jika dahulu perbuatan mengakhiri hidup sendiri merupakan perbuatan yang tabuh dan aneh, namun pada saat ini bukan lagi hal yang aneh bahkan sering terjadi dan dapat melalui legalitas pengadilan seperti yang sering terjadi di beberapa negara barat. Proses pengakhiran hidup dengan sengaja yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan disebut *Euthanasia*.

Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru.<sup>2</sup> Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba. Dari Yunanilah euthanasia bergulir dan berkembang ke beberapa negara di dunia, baik di Benua Eropa sendiri, Amerika maupun Asia. Di negara-negara barat, seperti Swiss, euthanasia sudah tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan lagi, bahkan euthanasia sudah dilegalisasi dan

---

<sup>2</sup>Hardinal, *Euthanasia dan Pesentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam, Dalam Mimbar Hukum* No.6 Tahun VII (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), h. 7-8.

diatur dalam Hukum Pidana.<sup>3</sup> Euthanasia merupakan suatu persoalan yang dilematik baik di kalangan dokter, praktis hukum, maupun kalangan agamawan.

Dalam praktik kedokteran baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun praktik pribadi petugas kesehatan, utamanya dokter dihadapkan pada dua masalah sekaligus, yakni masalah etik dan masalah hukum. Petugasa kesehatan atau dokter di dalam menjalankan tugasnya dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan acuan atau standar profesinya ia akan memperoleh sanksi “etik profesi” dari organisasi profesinya disamping itu, kemudian juga seorang dokter yang menjalankan tugasnya tidak semata-mata melanggar etika profesinya saja, tetapi juga melanggar hukum. Melanggar hukum yang dimaksud adalah kemungkinan melanggar Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden, peraturan menteri, dan seterusnya. Apabila seorang petugas kesehatan atau dokter melakukan pelanggaran hukum ini. Sesudah barang tentu sanksinya “hukuman” melalui prosedur hukum yang berlaku (pengadilan).<sup>4</sup>

Sudah merupakan fitrah manusia selalu ingin hidup sehat, baik fisik maupun mental. Namun keinginan manusia itu tidak selalu terpenuhi. Dalam hidupnya manusia terkadang sakit atau menderita suatu penyakit. Ada yang menderita suatu penyakit yang tergolong berat dan sukar, ada pula yang menderita suatu penyakit ringan dan mudah disembuhkan. Dari penyakit-penyakit ini, baik berat maupun ringan dianjurkan oleh agama untuk mengobatinya, karena sebagai mana sabda Rasulullah saw yang artinya “Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan ia menurunkan pula obatnya”.<sup>5</sup>

Orang-orang yang menderita suatu penyakit yang berat, ada yang tabah dan sabar serta tidak berputus asa dalam menghadapinya disertai dengan usaha untuk menyembuhkannya. Tidak sedikit pula yang tidak sabar dan tabah, bahkan ada yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sockidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 143.

<sup>5</sup> Al-Bukhari *Shahih Bukhary* (Juz V; Beirut: Dar Al-Fikri, t.th), h.11.

berputus asa dalam menghadapi penyakitnya. Setelah ia mengetahui bahwa penyakitnya sukar atau bahkan tidak dapat disembuhkan, timbul dalam pikirannya bahwa usaha apapun akan sia-sia menghabiskan biaya saja, sedangkan penyakitnya tidak sembuh-sem buh juga.

Pada prinsipnya, hak untuk hidup merupakan hak fundamental atau hak asasi dari setiap manusia. Konstitusi kita yakni UUD 1945 melindungi hak untuk hidup ini dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kematian pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, namun akan dialami oleh setiap orang. Kematian merupakan suatu proses yang tidak dapat ditunda, namun kebanyakan orang tidak mau kematian itu datang dengan segera.

Kebanyakan orang berharap agar kematian tidak muncul dengan tiba-tiba. Bukannya seseorang mengalami ketakutan menghadapi kematian itu sendiri, namun jauh lebih dari itu, orang lebih takut menghadapi keadaan setelah kematian terjadi. Mengingat *euthanasia* merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengkajian (*Muzakarah*) yang diselenggarakan pada bulan Juni 1997 di Jakarta yang menyimpulkan bahwa *euthanasia* merupakan suatu tindakan bunuh diri.<sup>6</sup>

Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, *euthanasia* tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.<sup>7</sup>

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mendapatkan kematian, sebab bagi mereka kematian bukan saja merupakan hal yang

---

<sup>6</sup>Forum Kedailan No. 4, 29 April 2001, h. 45.

<sup>7</sup>Amri Amr, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan* (Jakarta: Widya Medika, 1999), h. 72.

diharapkan, namun juga merupakan suatu hal yang dicari dan diidamkan. Terlepas dari siap tidaknya seseorang menghadapi kehidupan setelah kematian, ia menginginkan kematian segera tiba. Kematian yang diidamkan oleh para penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umurnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut *euthanasia* yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh.

Hampir semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh teknologi, harus disadari bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat untuk umat manusia. Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnose mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan.

Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seorang penderita dapat diperingan. Hidup seorang pasien pun dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, dengan memasang sebuah “ respirator “. Bahkan perhitungan saat kematian penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat. Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu:

1. Orthothanasia, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
2. Dysthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. Euthanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Dalam konteks hukum, euthanasia menjadi bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau senyawa seseorang oleh hukum sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, euthanasia menjadi bermasalah karena

kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya.<sup>8</sup> Berbicara mengenai *euthanasia*, khususnya euthanasia aktif, berarti berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau

Mengakhiri hidup seseorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu.<sup>9</sup> Antara pembunuhan sengaja dengan *euthanasia* aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski secara teknis ada persamaan. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan. Sedangkan dalam *euthanasia* aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana.

Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien. Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidakjelasan kedudukan pelaku *euthanasia* dalam jarimah. Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah apakah dari segi hukum pidana Islam melakukan tindakan *euthanasia* dapat dikategorikan telah melakukan *jarimah*.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi Permasalahan pokok kami jabarkan dalam dua sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan pelaku dan hukum *Euthanasia* dalam hukum pidana Islam?

---

<sup>8</sup>Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ghia Indonesia, 1984), h. 64.

<sup>9</sup>K. Bertens, *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan, dalam Klipping LSI* (Ed VII; Agustus 2000), h. 120.

## 2. Bagaimana *Euthanasia* menurut hak asasi manusia?

### C. *Devenisi Genaral dan Ruang Lingkup Penelitian*

#### 1. Devenisi Genaral

Sebelum menentukan pembatasan masalah, maka akan ditegaskan istilah pokok dalam tulisan ini. Hal tersebut penulis maksudkan agar tidak terjadi pengertian yang simpan siur karena Adapun istilah pokok dalam tulisan tersebut meliputi:

- a. *Euthanasia*, yaitu mempercepat proses kematian pada penderita penyakit, yang tidak dapat disembuhkan dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya.<sup>10</sup>
- b. *Perspektif*, dalam kamus ilmiah yang berarti: pengharapan, peninjauan, tinjauan, padang luas.<sup>11</sup>
- c. *Pidana*, perkara kejahatan (kriminal).<sup>12</sup> pidana secara tunggal juga bermakna sanksi yaitu hukuman atau imbalan negative berupa pembebanan dan penderitaan yang ditentukan dalam hokum.<sup>13</sup>
- d. *Hukum pidana (al-ahkam al-jinaiah)*, yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan segala bentuk pelanggaran dan sanksinya yang dimaksud untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik berupa agama, akal, jiwa, dan harta, maupun kehormatan.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), h. 28.

<sup>11</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Cet.I; Jakarta: Gitamedia Press, 2006).

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 871.

<sup>13</sup>Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Ekletisisme, dan Pandangan Non Muslim* (Cet. I; Jakarta: Kolam Publishing, 2008), h 45.

<sup>14</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 25.



Berangkat dari pengertian istilah pokok tersebut maka penulisan ini membatasi merumuskan permasalahannya pada kedudukan pelaku euthanasia dalam hukum Islam terlebih dahulu melihat dari segi ilmu kedokteran. Adapun yang dimaksud kedudukan adalah upaya menjelaskan tentang hukum euthanasia, jenis tindakan dan hukum para petugas medis dan pasien, dan pandangan hak asasi manusia terhadap euthanasia.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dari persoalan *Euthanasia* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Supremasi Hak Asasi Manusia yang akan dibahas. berkisar pada kinerja kedokteran dalam euthanasia, hukum pidana, hukum Islam serta pandangan hak asasi manusia dalam euthanasia.

### D. *Metodologi Penelitian*

#### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dengan metode penelitian komparatif dan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah: “sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah”.<sup>15</sup> Cara ini adalah dengan meneliti setiap pasal-perpasal, lalu dicarikan sumbernya dari berbagai literatur yang dapat diakses dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Peneliti akan menitik beratkan hanya pada bagaimana *Euthanasia* dalam hukum pidana Islam dan hak asasi manusia.

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, dalam penulisan skripsi ini, peneliti berusaha dengan maksimal membahas permasalahan secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa kejadian ini dapat memenuhi syarat sebagai

---

<sup>15</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 93.

suatu karya ilmiah, karenanya menggunakan metodologi yang tepat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian sasaran yang hendak dicapai.

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap dinamika fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah<sup>16</sup>. Terutama untuk mengkaji praturan perundang-undangan tentang hukum pidana Islam dan supermasi hak asasi manusia (HAM) Jika jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka secara garis besar digunakan pendekatanpendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, yaitu penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum Islam.
- b. Pendekatan terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional.
- c. Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mensinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi.

## 3. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data ialah bahan mentah yang perlu diolah, dari hukum syariah, yuridis, dan relasinya, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. Sedangkan data seyogyanya relevan artinya data yang ada hubungannya langsung dengan penelitian, muktahir artinya data yang diperoleh masih hangat dibicarakan, dan diusahakan oleh orang pertama (data primer).

---

<sup>16</sup>Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001) h. 5.

Data yang sudah ada dan memenuhi syarat perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses dan kegiatan penelitian.<sup>17</sup> yang dibagi dalam Data Primer data sekunder.

- a. Sumber bahan hukum yang bersifat *primer* itu diambil dari literatur yang berkaitan dengan *euthanasia* Walau bagaimanapun, penulis akan menitik beratkan di dalam pencarian tersebut pada pendapat tentang *euthanasia* dalam pandangan Islam dan hak asasi manusia.
- b. Sumber bahan hukum yang bersifat *sekunder* adalah ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun soft copy. Penulis menggunakan penelitian dengan mengelolah data-data dari beberapa bahan pustaka, jurnal, media internet, dan media lainnya yang berkaitan erat dengan pembahasan dan masalah yang ada dari beberapa karangan penulis buku baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung

- a. Kutipan Langsung yaitu dengan mengutip suatu pendapat atau kerangka sesuai dengan kerangka rujukan atau dengan buku asli tanpa merubah dengan sedikit pun.
- b. Kutipan tidak langsung yaitu dengan mengutip suatu pendapat atau penjelasan yang tanpa menguraikan makna yang sebenarnya dari rujukan asli.

### 4. Telaah Analisa Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan dikumpul dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis

---

<sup>17</sup>Riduwan, *Metode Teknik Penulisan Tesis* (Cet. IV; Bandung:, 2004), h. 106.

dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.<sup>18</sup> Dengan metode ini, melihat ketentuan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Islam dan supermasi hak asasi manusia.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan pelaku tindakan *euthanasia* dalam pandangan hukum pidana Islam dan *euthanasia* menurut hak asasi manusia.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu memperluas pemahaman dan wawasan mahasiswa utamanya penulis mengenai pemikiran penulis dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum pidana Islam pada khususnya mengenai kedudukan pelaku *euthanasia* dan dalam pandangan hak asasi manusia.
- b. Kegunaan praktis, sebagai modal dasar dalam mengembangkan dengan melakukan penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam hal kedudukan pelaku euthanasia dalam pandangan hukum pidana Islam dan tinjauannya dengan hak asasi manusia.

#### **F. Garis Besar Isi**

Untuk memahami gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis tampilkan sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi lima bab yang

---

<sup>18</sup>Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 11

berkaitan satu sama lain yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis..

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pengertian judul, kerangka pemikiran, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, garis-garis besar isi.

Bab II Tinjauan umum dan masalah sekitar euthanasia, bab ini membicarakan mengenai pengertian euthanasia serta macam-macam euthanasia, keadaan memungkinkan dilakukannya euthanasia serta euthanasia dalam Ilmu Kedokteran dan pandangan kode etik kedokteran.

Bab III Alisis hukum terhadap Euthanasia yang meliputi: Euthanasia dalam tinjauan hukum Islam, aspek hukum pidana (KUHP), dan analisis Undang-Undang hak asasi manusia terhadap euthanasia.

Bab IV Praktek Euthanasia Dalam Prespektif hukum Islam yang meliputi Hubungan Euthanasia dengan jarimah, pandangan syariat Islam, euthanasia dan hak asasi manusia.

Bab V pada bab yang terakhir ini, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Setelah diuraikan secara panjang lebar dan terperinci pada bab-bab sebelumnya, langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dari apa yang telah menjadi pokok pembahasan dalam karya ilmiah ini. Sedangkan saran-saran diajukan pula, demi perbaikan dan kesempurnaan dari pengaturan masalah euthanasia yang telah ada serta pandangan untuk masa-masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM EUTHANASIA

#### ***A. Pengertian Euthanasia***

Saat ini para petugas kesehatan menghadapi berbagai masalah yang serius akibat dari tindakan kesehatan sendiri. Kesadaran hukum masyarakat yang meningkat serta tuntutan mengenai aspek *bioetic* dan *medicolegal* dari profesi kesehatan yang semakin profesional. Diantara berbagai permasalahan yang serius tersebut adalah tentang euthanasia, karena mencakup permasalahan yang kompleks, dari aspek medik, hukum, agama, etika, dan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, akar kata “eu” yang artinya baik, tanpa penderita, dan “thanatos” yang artinya mati. Jadi “*euthanasia*” artinya mati dengan baik, atau mati dengan tanpa penderitaan, atau mati cepat tanpa derita.<sup>2</sup> Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing, a good death, atau enjoy death (mati dengan tenang). Jadi euthanasia berarti mempermudah kematian (hak untuk mati).

Hak untuk mati ini secara diam-diam telah dilakukan yang tak kunjung habis diperdebatkan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah qatlu ar-rahma atau taysir al-maut. Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti

---

<sup>1</sup>Ns. Ta’adi, *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional* (Jakarta: EGC, 2009), h 49-50.

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, h. 144.

mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.<sup>3</sup>

Bagi yang setuju menganggap euthanasia merupakan pilihan yang sangat manusiawi, sementara yang tidak setuju menganggapnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika dan agama. Euthanasia artinya mati yang baik tanpa melalui proses kematian dengan rasa sakit atau penderitaan yang berlarut-larut.<sup>4</sup> Dalam Kamus Inggris-Indonesia disebutkan, bahwa euthanasia termasuk kata benda yang berarti tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat.<sup>5</sup> Dalam istilah medis, Euthanasia berarti membantu mempercepat kematian agar tebebas dari penderitaan.

Menurut Dr. H. Ali Akbar, Euthanasia mempunyai pengertian:

1. Kematian yang mudah dan tanpa sakit
2. Usaha untuk meringankan penderitaan orang yang sekarat dan bila perlu untuk mempercepat kematiannya.
3. Keinginan untuk mati dalam arti yang baik.<sup>6</sup>

Euthanasia atau hak mati bagi pasien sudah ratusan tahun dipertanyakan. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba membahas euthanasia dari berbagai sudut pandang, namun demikian pandangan medis, etika, agama, sosial dan yuridis masih mengundang berbagai ketidakpuasan, sulit dijawab secara tepat dan

---

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 145.

<sup>4</sup>Syamsul Arifin, *Menurut Pandangan Islam: Euthanasia Dilarang* (Kiblat No.18.Th.XXVII, Februari ke 1 1981), h. 33.

<sup>5</sup>John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Gramedia, 1978), h. 219.

<sup>6</sup>Ali Akbar, *Euthanasia Dilihat Dari Hukum Islam* (Panji Masyarakat No.453.Th.XXVI, 21 Desember 1984), h. 69.

objektif. Secara etimologis euthanasia berarti kematian dengan baik tanpa penderitaan, maka dari itu dalam mengadakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, namun untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam arti yang demikian itu euthanasia tidaklah bertentangan dengan panggilan manusia untuk mempertahankan dan memperkembangkan hidupnya, sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya dari segi kesusilaan dapat dipertanggungjawabkan bila orang yang bersangkutan menghendakinya.

Akan tetapi dalam perkembangan istilah selanjutnya, euthanasia lebih menunjukkan perbuatan yang membunuh karena belas kasihan, maka menurut pengertian umum sekarang ini, euthanasia dapat diterangkan sebagai pembunuhan yang sistematis karena kehidupannya merupakan suatu kesengsaraan dan penderitaan. Inilah konsep dasar dari euthanasia yang kini maknanya berkembang menjadi kematian atas dasar pilihan rasional seseorang, sehingga banyak masalah yang ditimbulkan dari euthanasia ini. Masalah tersebut semakin kompleks karena definisi dari kematian itu sendiri telah menjadi kabur.

### ***B. Macam-macam Euthanasia***

Euthanasia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai jenis, sesuai dengan dari mana sudut pandang atau cara melihatnya.

#### **1. Euthanasia dilihat dari cara dilaksanakannya.**

##### **a. Euthanasia pasif**

Euthanasia pasif adalah menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang sedang berlangsung untuk mempertahankan hidupnya, seorang pasien sedang menjalani perawatan guna kelangsungan hidupnya dilakukan



tindakan medis melalui berbagai cara termasuk memberikan obat. Apabila tindakan medis ini dihentikan maka sudah barang tentu pasien ini meninggal.<sup>7</sup> Walaupun menghentikan secara sengaja bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup penderita.<sup>8</sup>

b. Euthanasia aktif

Euthanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara medis melalui intervensi aktif oleh seorang petugas kesehatan atau dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia (pasien).<sup>9</sup> Dengan kata lain secara sengaja melakukan tindakan/ langkah/ perbuatan mengakhiri atau memperpendek hidup penderita.<sup>10</sup> Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-'amad), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-An'aam/6: 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.<sup>11</sup>*

---

<sup>7</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, h. 146.

<sup>8</sup> Chrisdino M. Achadiat, *Dinamika Etika dan hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman* (Cet. I; Jakarta: EGC, 2007), h. 182.

<sup>9</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *loc. cit.*, h. 146.

<sup>10</sup> Chrisdino M. Achadiat, *loc. cit.*, h. 182.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 293.

## 2. Ditinjau dari permintaan.

Bagi pasien yang sudah sampai pada tahap terminal, tetapi pasien tersebut mengalami penderitaan yang berkepanjangan, maka seorang pasien dapat mengajukan permintaan kepada petugas medis untuk mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kondisi ini maka euthanasia dibedakan menjadi:

### a. Euthanasia volunter

Euthanasia jenis ini adalah Penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Permintaan dari pasien dilakukan dalam kondisi sadar atau dengan kata lain permintaan pasien secara sadar dan berulang-ulang, tanpa tekanan dari siapapun juga.<sup>12</sup>

### b. Euthanasia involunter

Euthanasia involunter adalah jenis euthanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak mungkin untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap famili pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan.<sup>13</sup> Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal.

### c. Euthanasia nonvoluntary

Euthanasia nonvoluntary yaitu mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga (misalnya keluarga), atau atas keputusan pemerintah.

## ***C. Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukannya Euthanasia***

Euthanasia mempunyai arti yang berdekatan dengan “membiarkan datangnya kematian” (letting die). Dalam literatur, euthanasia dibedakan antara yang aktif dan

---

<sup>12</sup> Sockidjo Notoatmodjo, *loc. cit.*, h. 146.

<sup>13</sup> *Ibid.*,

yang pasif. Euthanasia aktif diartikan melakukan suatu tindakan tertentu sehingga pasien meninggal, misalnya dengan mengakhiri pemberian nafas buatan melalui respirator atau mencabut ventilator dalam arti penghentian pemberian pernafasan artifisial. Sedang euthanasia pasif diartikan sebagai tidak dimulainya melakukan tindakan untuk memperpanjang hidupnya, tetapi yang tidak begitu bermanfaat lagi, bahkan akan menambah beban penderitaan (not initiating life support treatment). Misalnya tidak memberikan shock terapi dan tidak menyambung pernafasan dengan ventilator sesudah pasien manula penderita jantung kronis yang mendapat serangan jantung untuk kesekian kalinya dan sudah tidak sadarkan diri untuk waktu yang agak lama.

Seperti telah disebutkan pada awal tulisan ini, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kedokteran telah menambah beberapa konsep fundamental tentang mati. Kalau dahulu mati didefinisikan sebagai berhentinya denyut jantung dan pernafasan, maka dengan ditemukannya alat bantu pernafasan (respirator) dan alat pacu jantung (pace maker), maka seseorang yang oleh karena suatu hal mengalami henti nafas mendadak (respiratory arrest) atau henti jantung (cardiac arrest), masih ada kemungkinan ditolong dengan menggunakan alat tersebut, artinya pasien belum meninggal.

Persoalan yang kemudian timbul adalah sampai berapa lama orang itu bertahan dengan alat bantu tersebut. Keadaan semacam ini berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa di ketahui kapan akan berakhir, yang jelas kehidupannya tergantung kepada alat, dan kalau alat tersebut dicabut kemungkinan besar ia akan segera mati.

Secara medis sekarang diketahui jika rekaman otak masih menunjukkan fungsi yang baik, maka ada harapan orang tersebut akan siuman kembali, tetapi bila otak sudah tidak berfungsi, maka hampir tidak mungkin dia hidup tanpa bantuan alat tersebut, dengan kata lain dia hanya hidup secara vegetatif, yakni sel-sel tubuh saja yang masih menunjukkan tanda kehidupan. Dengan demikian sekarang dikenal istilah mati otak, yang menunjukkan bahwa otak sudah tidak berfungsi lagi.

Dalam keadaan seperti ini tidak jarang keluarga pasien meminta dokter untuk segera mengakhiri penderitaan pasien dengan cara melepas semua alat bantu, yang menjadi persoalan adalah: pertama, sampai hatikah seorang dokter dengan sengaja melepas alat bantu yang nota bene akan mengakhiri kehidupan seseorang?. Kedua, apakah dokter mempunyai hak untuk melakukan hal itu tanpa ia dikenai sanksi hukum?. Akan lebih rumit lagi apabila permintaan pasien (keluarganya) adalah dengan alasan sosial ekonomi (biaya) sehingga keluarga memaksa untuk membawa pulang pasien, pada yang terakhir ini jelas yang harus mencabut segala alat bantu adalah dokter (dokter yang bertanggungjawab).

#### ***D. Euthanasia dalam Ilmu Kedokteran***

Proses kematian dini baik yang dkehendaki oleh si penderita (yang menderita sakit) maupun yang tidak dkehendaki dalam hubungannya dengan seseorang yang seharusnya mendapatkan perawatan dan perawatan dokter akan menjadi tidak sederhana.<sup>14</sup> Bagi seorang dokter, masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Disatu pihak teknologi kedokteran telah sedemikian maju, sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walupun

---

<sup>14</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Praktis* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 151.

hidup yang vegetatif atau vegetatif state) sedangkan disisi lain, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu juga berkembang tidaklah pesat. Dengan demikian , konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini telah dihadapkan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum disuatu pihak; dengan kemampuan, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang demikian maju dipihak lain sehingga memungkinkan untuk mempertahankan hidup vegetatif tadi.<sup>15</sup>

#### 1. Konsep tentang Mati

Untuk dapat memahami lebih jauh timbulnya masalah euthanasia, maka perlu difahami tentang konsep mati yang dianut dari dulu hingga kini. Perubahan pengertian ini berkaitan dengan adanya alat-alat resusitasi, berbagai alat atau mesin-mesin penopang hidup dan kemajuan dalam perawatan intensif. Dahulu, apabila jantung dan paru-paru sudah tidak bekerja lagi, orang sudah dinyatakan mati dan tidak perlu diberi pertolongan lagi. Kini keadaan sudah berubah, dalam perawatan intensif (di rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan ahlinya) jantung yang sudah berhenti dapat dipacu untuk bekerja kembali.<sup>16</sup> Bila demikian, apa yang dimaksud dengan "mati". Penting bagi para dokter untuk memperjelas arti mati, maka dari itu perlu dijelaskan arti "mati". Ada beberapa konsep tentang kematian atau konsep tentang mati antara lain:

##### a. Berhentinya darah mengalir

Konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir keseluruh tubuh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1988, mati didefinisikan “berhenti darah mengalir”.<sup>17</sup> Karena nafas

---

<sup>15</sup>Chrisdino M. Achadiat, *op. cit.*, h. 180-181.

<sup>16</sup>Ns. Ta’adi, *op. cit.*, h. 52.

<sup>17</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *loc. cit.*, h. 144.

dan darah bahan yang menandakan kehidupan, maka bila tidak terjadi lagi pernafasan dan peredaran darah, itu berarti bahwa kematian sudah menjadi kenyataan. Dalam kedokteran, teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang semula berhenti adakalanya dapat dipulihkan kembali.<sup>18</sup> Maka mencermati dari peraturan pemerintah tentang mati ini dapat ditinjau kembali dengan kemajuan teknologi yang mengglobal.

b. Pemisahan tubuh dan jiwa

Manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa atau kesatuan materi dan bentuk. Jiwa atau bentuk menjiwai tubuh atau materi, sehingga tersusunlah makhluk yang unik yang disebut manusia. Kematian berlangsung, jika dua unsur ini dipisahkan. Kematian berarti terputusnya kesatuan tubuh dan jiwa. Jika kita beranggapan bahwa sekali nyawa terlepas, tidak mungkin manusia dapat menarik kembali, maka kriteria berhentinya darah mengalir pada saat nyawa meninggalkan tubuh tidak tepat lagi<sup>19</sup>

c. Kematian otak

Kriteria ini adalah: tidak sanggup menerima rangsangan dari luar dan tidak ada reaksi atau rangsangan, tidak ada gerak spontan atau pernafasan, tidak ada refleks; dan situasi ini diteguhkan oleh elektro ensefalo gram (EEG). Otak adalah pusat penggerak dan pengendali secara fisik dan sosial. Mati menurut konsep ini adalah hilangnya “hidup” manusia secara permanen, sehingga fisik dan sosialnya sudah tidak berfungsi lagi. Menurut UU Kesehatan No 36 Tahun 2009, Pasal 117, seorang dikatakan mati apabila fungsi sistem jantung, sirkulasi dan sistem,

---

<sup>18</sup>Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 53.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.<sup>20</sup> Kematian seluruh otak (batang otak, cortex dan neo cortex) berarti kematian manusia, karena tanpa organ ini bagi manusia tidak mungkin mempertahankan integrasi biologisnya dan karena itu juga integrasi sosialnya.

## 2. Hak-Hak Pasien.

Berkembangnya etika pelayanan kesehatan sebagai suatu bidang khusus dan pencarian pelbagai hak melalui pengadilan telah membantu untuk menetapkan banyak hak dalam konteks pelayanan kesehatan. Di antaranya adalah penghormatan atas hak pasien. Dalam hal ini penghormatan atas hak pasien untuk penentuan nasib sendiri masih memerlukan pertimbangan dari seorang dokter terhadap pengobatannya. Pasien harus diberi kesempatan yang luas untuk memutuskan nasibnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun setelah diberi informasi yang cukup, sehingga keputusannya diambil melalui pertimbangan yang jelas. Asas perjanjian terapeutik bertumpuh pada dua macam hak asasi paling mendasar yaitu hak untuk menentukan hak sendiri dan hak atas informasi.<sup>21</sup>

Maka hak utama dari pasien tentunya adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan. Pada masa kini hubungan tidak mendapat tempat karena masyarakat telah semakin sadar atas hak-hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to health care*).<sup>22</sup> Hak untuk mendapatkan pemeliharaan

---

<sup>20</sup> Sockidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, h. 145.

<sup>21</sup> Y. A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran* (Cet. I; Malang: Bayumedia, 2007), h. 15.

<sup>22</sup> Chrisdino M. Achadiat, *op. cit.*, h. 34.

kesehatan yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan dan bantuan dari tenaga kesehatan, yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.

Masyarakat adalah dipihak yang dilayani yang harus “tunduk” terhadap apaun yang dikatakan oleh petugas kesehatan. Masyarakat atau pasien hanya mempunyai kewajiban, tidak mempunyai hak apapun terhadap petugas kesehatan. Ddemikian pula petugas kesehatan, mereka hanya mempunyai hak dan tidak mempunyai kewajiban apa pun terhadap masyarakat atau pasien. Dalam perspektif etika dan hukum kesehatan kedua belah pihak, baik masyarakat atau pasien dan petugas kesehatan (termasuk dokter) keduanya mempunyai hak dan kewajiban, yang saling diakui dan dihormati. Hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas kesehatan dan juga harus diakui dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan.<sup>23</sup>

Penghormatan hak pasien untuk penentuan nasib sendiri masih memerlukan pertimbangan dari seorang dokter terhadap pengobatannya. Hal ini berarti para dokter harus mendahulukan proses pembuatan keputusan yang normal dan berusaha bertindak sesuai dengan kemauan pasien sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. Pasien harus diberi kesempatan yang luas untuk memutuskan nasibnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun setelah diberikan informasi yang cukup sehingga keputusannya diambil melalui pertimbangan yang jelas. Beberapa pasien tidak dapat menentukan pilihan pengobatan sehingga harus orang lain yang memutuskan apa tindakan yang terbaik bagi pasien itu. Orang lain disini tentu

---

<sup>23</sup> Sockidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, h. 170.



dimaksudkan orang yang paling dekat dengan pasien dan dokter harus menghargai pendapat-pendapat tersebut. Agar lebih jelas dapat diuraikan hak-hak pasien yaitu sebagai berikut:

a. Hak atas informasi

Hak informasi dan atau memberikan persetujuan, hal ini dikenal dengan *informed consent*.<sup>24</sup> Agaknya hak yang paling penting adalah hak atas informasi. Jika seseorang tidak tahu, ia tidak bisa memilih, tidak bisa membuat rencana, tidak dapat menguasai situasi. Kemungkinan untuk memperoleh informasi merupakan syarat untuk menjalankan otonomi, dan jika pasien tidak mempunyai kemungkinan itu, ia tetap tinggal korban paternalisme.

b. Hak atas persetujuan

Hak untuk menentukan diri sendiri (*the right of self determination*) juga terproses sejalan dengan perkembangan dari hak asasi manusia. Dihubungkan dengan tindakan medik, maka hak untuk menentukan diri sendiri diformulasikan dengan apa yang dikenal dengan persetujuan atas dasar informasi (*informed consent*). Hal ini kemudian dijabarkan menjadi dua: (1) pasien harus memahami dan mempunyai informasi yang cukup untuk mengambil keputusan mengenai perawatan terhadap dirinya. (2) pasien harus memberikan persetujuan atas perawatan terhadap terhadapnya, baik secara lisan atau tertulis, secara eksplisit maupun implisit.<sup>25</sup> Adalah hak asasi pasien untuk menerima atau menolak tindakan medik yang ditawarkan oleh dokter, setelah dokter memberikan informasi.

c. Hak untuk menolak pengobatan

---

<sup>24</sup> Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 28.

<sup>25</sup> Chrisdino M. Achadiat, *op. cit.*, h. 36

Jika seseorang mempunyai hak untuk memberi persetujuan dengan suatu pengobatan atas dasar informasi yang diberikan sebelumnya, maka tidak bisa dihindarkan konsekuensi bahwa ia mempunyai hak juga untuk menolak pengobatan. Penolakan seperti ini sebagai perwujudan otonomi pasien dalam hak menentukan dirinya. Oleh karena melakukan kepercayaan tertentu, seorang pasien tidak mau menerima tranfusi darah dari orang lain. Dalam kejadian seperti ini petugas tidak dapat memaksa tetapi pasien harus menandatangani surat penolakan yang lebih penting petugas harus sudah menjelaskan tentang alasan tindakan dan resiko jika tidak dilakukan tindakan tersebut.<sup>26</sup>

d. Hak atas privacy

Konfidensialitas dan perlindungan informasi yang diperoleh tenaga medis dalam hubungan dengan pasiennya adalah sangat penting. Jika konfidensialitas tidak dapat dijamin, maka orang akan enggan mencari bantuan medis, hal ini sebagai dasar bagi relasi antara dokter dan pasien. Dalam beberapa literatur disebutkan perumusan dari rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang oleh pasien secara sadar atau tidak sadar disampaikan kepada dokter/ perawat/ dan pula segala sesuatu oleh dokter/ perawat diketahui sewaktu mengobati.<sup>27</sup>

e. Hak atas pendapat kedua

Yang dimaksud dengan pendapat kedua ialah adanya kerjasama antara dokter pertama dengan dokter kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil pekerjaannya kepada dokter kedua. Kerjasama ini bukan atas inisiatif dokter yang pertama, tetapi atas inisiatif pasien. Sesungguhnya hal ini dapat dilakukan

---

<sup>26</sup>Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 29.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 29.

atas saran petugas itu sendiri, tidak ada masalah ketersinggungan pada petugas satu dengan lainnya sepanjang pasien terbuka dengan itikad baik. Memilih petugas kesehatan adalah hak pasien.<sup>28</sup>

f. Catatan medis di rumah sakit

Rekam medik adalah berkas yang berisi catatan, dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Kebutuhan pasien atas catatan medis sebagai dasar pengetahuan untuk melaksanakan hak otonominya. Dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran Pasal 47 ayat (1) menyatakan tentang hak atas kepemilikan rekam medis. Bahwa rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medik tentang pasien.<sup>29</sup> Rekam medik dalam dunia kesehatan di adakan untuk dijadikan sebagai referensi ataupun acuan untuk lebih bertindak memberikan pelayanan secara profesional, maupun untuk generasi penurus dalam dunia kedokteran.

3. Pandangan Kode Etik Kedokteran

Sebelum kita jauh mengetahui pendapat dari para ahli medis tentang euthanasia, ada baiknya kita mengetahui apa sebenarnya pengertian mati itu. Pada umumnya ada dikenal beberapa konsep tentang mati, yaitu :

- a. Mati sebagai berhentinya darah mengalir. Konsep ini bertolak dari criteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir keseluruhan tubuh.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

- b. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh. Pada umumnya banyak yang beranggapan bahwa terlepas dari tubuh ketika tubuh ketika darah berhenti mengalir. Tetapi dikaitkan dengan perkembangan teknologi, dapatkah nyawa ditarik kembali melalui teknologi resusitasi? Jika kita beranggapan bahwa sekali nyawa itu lepas, tidak mungkin manusia dapat menariknya kembali, maka criteria berhentinya darah mengalir pada saat nyawa meninggalkan tubuh dapat dikatakan sudah tidak tepat lagi.
- c. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanent. Dalam pengertian ini, fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali, karena fungsi pengendaliannya (otak) sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan mereka. Pandangan ini memang sudah sangat teknis namun belum dapat memastikan bahwa otak telah mati. Hanya bahwa otak tidak lagi mampu mengendalikan fungsi organ-organ lain secara terpadu. Pandangan ini diwarnai oleh pengalaman dalam teknologi transplantasi, memang pandangan ini memadai. Tetapi secara moral masih menjadi pernyataan, jika organ-organ manusia masih berfungsi, meskipun tidak terpadu lagi, benarkah orang itu sudah mati.
- d. Hilangnya kemampuan manusia secara permanent untuk kembali sadar dan melakukan interaksi social. Konsep ini dikembangkan dari ketiga hal di atas, tetapi dengan penekanan nilai moral yaitu dengan memperhatikan fungsi manusia sebagai makhluk social. Manusia digambarkan oleh Henry Beecher sebagai “individu yang mempunyai kepribadian, menyadari kehidupannya, kekhususannya, kemampuannya, mengingat, menentukan sikap dan mengambil keputusan, mengajukan alasan masuk akal, mampu berbuat, menikmati,

mengalami kecemasan dan sebagainya”. Konsep ini tidak lagi melihat apakah organ-organ tubuh yang lain masih mampu atau tidak menjalankan fungsi pengendalian, baik secara jasmani maupun sosial, atau tidak menjadi pertimbangan utama lagi, tetapi juga dilupakan.<sup>30</sup>

Tugas professional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etik kedokteran, sehingga kemuliaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya semau pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala-galanya syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan, keahlian dibidang ilmu dan teknik baru dapat member manfaat yang sebesar-besarnya, kalau dalam prakteknya, kalau dalam prakteknya disertai oleh norma-norma etik. Dan moral tersebut diinsyafi oleh para dokter diseluruh dunia, dan hampir tiap-tiap Negara telah mempunyai kode etik kedokterannya sendiri-sendiri. Pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada sumpah hipocrates, yang dirumuskan kembali dalam pernyataan himpunan dokter se-dunia di London bulan Oktober 1949 dan diperbaiki oleh siding ke-22 himpunan tersebut di Sidney bulan Agustus 1968.

Sejak permulaan sejarah kedokteran, seluruh umat manusia mengakui serta mengetahui akan adanya beberapa sifat fundamental yang melekat secara mutlak ada diri seseorang yang baik dan bijaksana, yaitu kemurniaan niat, kesungguhan dalam bekerja, kerendahan hati serta integritas ilmiah dan sosial yang tidak diragukan. Oleh sebab itulah para dokter diseluruh dunia bermaksud mendasarkan

---

<sup>30</sup> Amir *op. cit.*, h. 69-70.

tradisi dan disiplin kedokteran tersebut dalam suatu etik professional yang sepanjang masa mengutamakan penderita tersebut. Sejak permulaan sejarah kedokteran pula para dokter berkeyakinan bahwa suatu etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas asas-asas etik yang mengatur hubungan antara manusia pada umumnya.

Khusus untuk Indonesia, pernyataan semacam ini secara tegas telah dicantumkan dalam kode etik Kedokteran Indonesia, yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Oktober 1968. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI tentang: pernyataan berlakunya kode etik kedokteran Indonesia, tertanggal 23 Oktober 1969. Kode etik kedokteran Indonesia ini dibuat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 30 agustus 1969 No. 55/WSKN/1969. Dalam bab II pasal 9 dari kode etik kedokteran Indonesia tersebut, dinyatakan bahwa : “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insan”.<sup>31</sup> Dengan demikian berarti dinegara manapun didunia ini seorang dokter mempunyai kewajiban untuk “menghormati setiap insan mulai saat vterjadinya pembuahan”.

Dalam hal ini bearti pula bahwa bagaimanapun gawatnya sakit seorang pasien, setiap dokter tetap harus melindungi dan mempertahankan pasien itu sebenarnya sudah tidak dapat disembuhkan lagi atau sudah dalam keadaan sekarat berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi dalam hubungan ini, dokter tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban untuk selalu melindungi hidup manusia sebagaimana yang diucapkan dalam sumpahnya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan untuk memelihara kesehatan. Dan kebahagiaan.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 20.

Dengan sendirinya ia harus memberikan kehidupan manusia. Walaupun kadang-kadang ia terpaksa melakukan operasional yang sangat membahayakan, tetapi tindakan ini diambil setelah dipertimbangkan secara mendalam, bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa, supaya si pasien dapat terhindar dari ancaman maut. Sekalipun dalam operasi dimulai, perlu adanya pernyataan persetujuan secara tertulis dari pasien dan keluarganya. Karena naluri terkuat daripada manusia adalah mempertahankan hidupnya dan ini juga termasuk salah satu tugas seorang dokter, maka menurut etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan : (1) Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*) (2) Mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).<sup>32</sup>

#### a. Abortus Provocatus

Tidak hanya dalam dunia kedokteran, ternyata masalah abortus provocatus ini pun dalam hukum pidana kita juga dilarang, sebagai contoh dapat kita lihat dalam Pasal 346 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

*Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*<sup>33</sup>

Disamping Pasal 346 KUHP diatas, masih banyak pasal-pasal lain yang menyatakan bahwa abortus provocatus ini merupakan tindak pidana, misalnya Pasal 347, dan Pasal 349 KUHP. Walaupun abortus provocatus ini merupakan perbuatan yang terlarang, namun hal ini masih dapat diterobos oleh seorang dokter dengan pertimbangan untuk pengobatan, dan apabila perbuatan itu hanya merupakan satu-satunya jalan untuk menolong jiwa si ibu dari bahaya maut.

---

<sup>32</sup>Kode Etik Kedokteran Indonesia (Jakarta: Yayasan Penerbit IDI, 1969), h. 45.

<sup>33</sup>Moelyatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Terj. Seksi Hukum Pidana UGM, Cct VIII; Yogyakarta, 1971), h. 18.

Keputusan untuk melakukan abortus provocatus ini harus diambil sekurang-kurangnya oleh dua dokter dengan persetujuan tertulis daripada perempuan yang hamil dan suaminya, atau keluarganya yang terdekat, abortus jenis inilah yang disebut “abortus provocatus” therapeuticus. Bagaimanapun abortus provocatus itu bentuknya, dan dengan alasan apapun dalam kehidupan masyarakat disamping dianggap sebagai kejahatan menurut KUHP, juga merupakan barang yang tabu, karena dilarang oleh agama, juga sangat bertentangan dengan asusila kemasyarakatan. Dalam hubungan ini Nasroen Yasabari mengatakan bahwa: abortus merupakan arang yang tercoreng dikening dan lumpur yang terpoles dimuka serta aib yang berat bagi keluarga.

#### b. Euthanasia

Karena penderitaan yang tidak tertahankan lagi, pasien yang menyatakan sudah tidak mungkin disembuhkan itu, minta agar hidupnya diakhiri saja sampai sebegitu jauh, tidak semua orang setuju akan prinsip euthanasia. Para dokter pun demikian halnya. Pada pokoknya kelompok ini menyatakan, segala sesuatu yang religius. Pada pokoknya kelompok ini menyatakan, segala sesuatu yang dialami oleh manusia, karena hal itu mengandung makna dan tujuan tertentu. Dengan demikian berarti penderitaan seseorang dalam sakit yang tengah dideritanya, walau bagaimanapun keadaannya memang sudah menjadi kehendak Tuhan.

Argumentasi demikian tadi rupa-rupanya juga dikemukakan dalam penjelasan kode etik kedokteran Indonesia, bab II, Pasal 9 yang sekaligus juga mencerminkan sikap atau pandangan pada dokter di Indonesia tentang prinsip dan etika dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Sebaliknya bagi kelompok yang menyetujui adanya euthanasia itu disertai argumentasi bahwa perbuatan demikian, terpaksa dilakukan



atas dasar perikemanusiaan. Mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh pasiennya, dan telah berulang kali minta kepadanya agar penderitaannya itu diakhiri saja. Di dalam ilmu kedokteran, kata euthanasia digunakan dalam tiga arti, yaitu :

- 1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah.
- 2) Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang.
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari ketiga jenis euthanasia di atas, ternyata pada jenis yang ketiga inilah yang senada dengan euthanasia yang dilarang oleh hukum pidana kita, dan diatur dalam Pasal 344 KUHP. Dalam hal ini Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) dr. Farid Anfasa Moeloeck mengatakan euthanasia belum bisa dilakukan di Indonesia karena belum diatur dalam Undang-undang “Jika euthanasia dilaksanakan hal itu melanggar Undang-undang tetapi jika pasien atau pihak keluarga menginginkannya, silakan membawa berkas kasusnya ke Pengadilan. Jika disetujui baru euthanasia bisa dilakukan”.<sup>34</sup>

Dibeberapa Negara maju seperti Eropa dan Amerika mulai banyak terdengar suara-suara yang pro terhadap adanya euthanasia ini. Mereka berusaha mengadakan suatu gerakan untuk menguatkannya dalam Undang-undang negaranya. Bagi orang yang kontra terhadap prinsip euthanasia, berpendapat bahwa tindakan demikian itu sama saja dengan membunuh. Di Indonesia, sebagai Negara

---

<sup>34</sup> *Harian Media Indonesia 20 September 2004 rubrik kesehatan, <http://www.mediaindo.co.id>*

yang beragama dan berPancasila percaya kepada kekuasaan mutlak dari Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu diciptakan-Nya dan penderitaan yang diberikan kepada makhluk manusia, dan arti dan maksudnya. Oleh sebab itu, dokter harus mengerahkan segala kepandaian dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup, tidak untuk mengakhiri hidup daripada sesama manusia yang ada dimuka bumi ini.

Tugas profesional dokter begitu mulia dalam pengabdianya kepada sesama manusia dan tanggung jawab dokter makin tambah berat akibat kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu kedokteran. Dengan demikian, maka setiap dokter perlu menghayati etika kedokteran, sehingga kemulyaan profesi dokter tersebut tetap terjaga dengan baik. Para dokter, umumnya semua pejabat dalam bidang kesehatan, harus memenuhi segala syarat keahlian dan pengertian tentang susila jabatan. Keahlian dibidang ilmu dan teknik baru dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kalau dalam prakteknya disertai oleh norma-norma etik dan moral. Hal tersebut diinsyafi oleh para dokter diseluruh dunia. Dan pastinya di setiap Negara mempunyai kode etik kedokteran sendiri-sendiri.

Pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada sumpah Hippocrates. “Ilmu kedokteran adalah upaya untuk menaggulangi penderitaan si sakit, menyingkirkan penyakit, dan tidak mengobati kasus-kasus yang tidak memerlukan pengobatan. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun dimintanya, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Manusia pada akhirnya akan mati, dokter tidak dapat berharap ia akan dapat menyembuhkan setiap pasiennya. Ada batas ketika penyembuhan tidakberdaya lagi. Dokter harus mengenali dan menerima kedatangan saat-saat maut bagi

pasiennya, bahkan sebagai seorang yang berpengetahuan ia harus menunjukkannya dengan perbuatan, yaitu jangan berusaha untuk menyembuhkannya, karena ini berarti membohongi diri sendiri dan pasiennya”<sup>35</sup>

Dari pandangan Hippocrates tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dokter tidak lagi mengobati penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak perlu diobati atau tidak membohongi pasien yang sebenarnya sudah tidak memerlukan obat. Misalnya dengan memberikan resep tertentu atau dengan memberikan medikasi lainnya. Dan berarti hippocrates tidak akan memberikan obat yang memetikan sekalipun pasien telah memintanya. Dalam situasi apapun keadaan pasien, Hippocrates tetap menolak tindakan euthanasia aktif.

Disamping itu dokter tidak harus terus berupaya mengobati penyakit-penyakit yang tidak dapat disembuhkan kembali. Apabila pengobatan atau perawatan sudah tidak ada gunanya, maka dokterpun sudah tidak berkompeten lagi untuk melakukan medikasi terhadap pasiennya. Naluri terkuat dari makhluk hidup termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia diberi akal, kemampuan berfikir dan mengumpulkan pengalamannya. Dengan demikian, membangun dan mengembangkan ilmu untuk menghindarkan diri dari bahaya maut adalah merupakan tugas dokter. Ia harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani.

Hal ini, berarti dokter dilarang mengakhiri hidup pasien (euthanasia), walaupun menurut ilmu kedokteran dan pengalamannya pasien tidak mungkin sembuh. Jadi, jelas bahwa Kode etik kedokteran Indonesia melarang tindakan euthanasia aktif. Dengan kata lain, dokter tidak boleh bertindak sebagai Tuhan

---

<sup>35</sup>Djoko Prakoso dan Djaman Andi nirwanto, *op. cit.*, h 79.

*(don't play god). Medical ethics must be pro life, not pro death.* Dokter adalah orang yang menyelamatkan atau memelihara kehidupan, bukan orang yang menentukan kehidupan itu sendiri (*life savers, not life judgers*).<sup>36</sup> Sebetulnya kode etik kedokteran Indonesia sudah lama berorientasi pada pandangan-pandangan Hippocrates yang telah lama menerima euthanasia pasif.

Begitu juga dengan kode etik kedokteran Indonesia, berarti ia juga menerima euthanasia dalam bentuk pasif. Bila dirasakan penyakit pasien sudah tidak dapat disembuhkan kembali, maka lebih baik dokter membiarkan pasien meninggal dengan sendirinya. Tidak perlu mengakhiri hidupnya, dan juga tidak perlu berusaha keras untuk mempertahankan kehidupannya, karena kematiannya sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Akan tetapi, perawatan (pengobatan) seperlunya masih tetap dilakukan. Asalkan jangan mengada-ada melakukan tindakan medik (yang sebetulnya tindakan medik itu sudah tidak diperlukan lagi), apalagi dengan motif-motif tertentu, misalnya mencari keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan orang lain.<sup>37</sup>

Adalah tugas ilmu kedokteran untuk membantu meringankan penderitaan pasien, atau bahkan berusaha menyembuhkan penyakit selama masih dimungkinkan. Pasien yang benar-benar menderita atas penyakitnya, sudah menjadi tugas dokter untuk ikut membantu meringankan penderitaanya, walaupun kadang-kadang dari tindakan peringanan tersebut dapat mengakibatkan hidup pasien diperpendek secara perlahan-lahan (euthanasia tidak langsung).

---

<sup>36</sup>Petrus Yoyo Karyadi, *op. cit.*, h. 86.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

### BAB III

#### EUTHANASIA DALAM HUKUM POSITIF

##### **A. Aspek Hukum Pidana (KUHP) Euthanasia.**

Perbuatan pidana dapat dilakukan, baik oleh manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*). Pelaku tindak pidana tentunya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Ada perbedaan bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan antara manusia alamiah dan badan hukum. Hal ini juga berlaku dalam praktik pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan maupun fasilitas sarana pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan yang tidak berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dilakukan secara perorangan, baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama (dalam bentuk pernyataan). Sementara itu, apabila sarana pelayanan kesehatan berbentuk badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana maka dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.<sup>1</sup> Sesuai dengan KUHP

Pasal 304 “Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

”Pasal 306 “Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan”. Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 344: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”.

Pasal 345 : “Barang siapa yang mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan ini atau memberi sarana kepada untuk itu,

---

<sup>1</sup>Y. A. Triana Ohoiwutun, *op. cit.*, 59-60.

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu menjadi bunuh diri.”

Undang undang yang tertulis dalam KUHP Pidana diatas hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut. Tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal pasal dalam undang undang yang terdapatdalam KUHP Pidana.

Meskipun euthansia bukan istilah yuridis, namun dalam euthansia mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik hukum pidana atau hukum perdata. Oleh sebab itu perlu dicermati dengan sungguh-sungguh oleh semua praktisi kesehatan (dokter, perawat, bidang atau yang lain) menurut kitan Undang\_undang hukum pidana yang berlaku saat ini, di Indonesia seseorang dapat dipidana atau dihukun jika ia menghilangkan nyawa orang lain atau kurang hati-hatiannya.<sup>2</sup> Ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan euthanasia terdapat beberapa pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), yakni:

---

<sup>2</sup> Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 56.

1. Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun (KUHP Pasal 344).
2. Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara selama 20 tahun (KUHP Pasal 340).
3. Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya setahun (KUHP Pasal 359).<sup>3</sup>
4. Baarang siapa dengan sengaja dan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena maker mati, dengan penjara selama-lamanya 15 tahun. (KHUP Pasal 338)
5. Seseorang ibu dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan ataupun tidak berapa lama setelah dilahirkan karena ketahuan bila ia sudah melahirkan anak, dihukum karena maker mati terhadap anak (*kinderdoodslog*) denga hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. (KHUP Pasal 341)
6. Bagi orang lain yang turut campur dalam kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dianggap kejahatan itu sebagai makarmati atau pembunuhan. (KHUP Pasal 343).<sup>4</sup>

Dilema yang dihadapi kalagan kesehatan dalam masalah ini sama pelitnya dengan masalah abortus propokatus. Factor perubahan pandangan kesehatan hukum

---

<sup>3</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *op. cit.*, h. 147.

<sup>4</sup>Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 56-57.

dan masyarakat selalu berpengaruh dari upaya pemecahan masalah tersebut. Sementara ini setiap hari dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama yang dirawat di rumah sakit kasus-kasus euthanasia selalu dihadapi petugas kesehatan, namun pedoman untuk memilih sikap ini belum ditentukan. Akhirnya dapat dikemukakan dalam menghadapi masalah euthanasia yang rumit, karena tidak ada pilihan pengibatan yang lebih baik, mutlak diperlukan diskusi dengan para kolega dokter dan team kesehatan lain, keluarga, maupun tokoh agama, dan tokoh masyarakat sehingga dapat menemukan solusi yang tepat.<sup>5</sup>

Pengutipan beberapa pasal tersebut sebagai objek dari ilmu kedokteran kehakiman bukan berarti menunjukkan bahwa hanya pasal tersebutlah yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman dalam menyelesaikannya, sebab sering dengan kemajuan peradaban kehidupan manusia maka kompleksitas kejahatan dengan segala modus operandinya dan juga jenisnya menuntut penyelesaian yang baik dan benar sehingga memuaskan pencari keadilan. Sungguhpun demikian kesemuanya itu tidak harus mengesampingkan asas legalitas serta dengan pertimbangan bahwa kasus tersebut memang baru dapat dimungkinkan menyelesaikannya dengan melalui bantuan ilmu kedokteran kehakiman.<sup>6</sup>

#### ***B. Analisa Undang-Undang Hak Asasi Manusia Terhadap Euthanasia***

Dalam rangka menjamin hak asasi manusia nampaknya pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menerbitkan Undang-undang tentang hak asasi manusia. Walaupun tidak mungkin semua hak asasi manusia dimaksud diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya UU No. 39

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 57-58.

<sup>6</sup> Tolib Setiady, *op. cit.*, h. 37.



tahun 1999 tentang hak asasi yang meliputi pada seluruh aspek kehidupan manusia, terbukti dalam Pasal 105 ayat 1 sebagai klausul yang menyatakan “bahwa disamping hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai Konvensi Internasional yang telah diratifikasikan oleh Negara RI yang sudah menjadi hukum positif bagi rakyat Indonesia.” Tentunya sangat menyambut baik terhadap keberadaan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut, yang didalamnya pula sekaligus mengatur lembaga pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia yaitu dinamakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ini, Komnas HAM diberi wewenang untuk melakukan “sub poena”, yaitu berwenang memanggil saksi-saksi dengan sanksi bilamana tidak memenuhi panggilan dimaksud tanpa alasan yang sah. Bahkan juga dapat meminta dokumen tertulis sebagai barang bukti atas izin Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan lain yang dimungkinkan adalah dalam penyidikan terhadap pelanggaran hak asasi berat, diakui sebagai barang bukti awal yang cukup guna diproses oleh penyidik dan penuntut umum dan diteruskan ke Pengadilan. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, hak kodrat yang paling utama diatur adalah hak untuk hidup sebagaimana diatur di dalam

Pasal 9 ayat 1 yaitu:

*“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”<sup>7</sup>*

Pasal 33 ayat 2 yaitu :

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”<sup>8</sup>.*

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (<http://www.yahoo.com>)

<sup>8</sup> *Ibid.*,

Sedangkan di dalam pengertian hak untuk hidup tercakup pula di dalamnya hak untuk mati. Berbicara mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mati akan terkait dengan masalah Hukum Pidana yang disebut dengan euthanasia. Namun masalah hak untuk mati itu tidaklah bersifat mutlak, jadi masih terbatas dalam suatu keadaan tertentu, misalnya bagi penderita suatu penyakit yang sudah tidak dapat diharapkan lagi penyembuhannya dan pengobatannya yang diberikan sudah tidak ada gunanya lagi. Dalam situasi yang demikian, si penderita boleh menggunakan hak untuk matinya dengan cara kepada dokter untuk menghentikan pengobatan. Misalnya menjadi semakin rumit, bila seseorang pasien sudah sekarat dan tidak sadar selama berbulan-bulan, kemudian mengetahui pula bahwa tidak lama lagi maut akan merenggut nyawanya. Baik penderita maupun keluarganya telah berkali-kali mendesak dokter yang merawatnya supaya mengakhiri penderitaan yang tiada terhingga itu dengan jalan melakukan tindakan euthanasia.

Menurut konsep otonomi ini, seorang pasien memiliki moral untuk menentukan intervensi medis atas dirinya, baik untuk mengadakan diagnosis maupun untuk penyembuhan (terapi). Seorang yang menderita sakit terminal boleh meminta ahli medis untuk tidak meneruskan tindakan memperpanjang hidupnya. Jika proses mati sungguh membuat menderita dan kesulitan, sedangkan menghentikannya mudah, sudah seharusnya kita memilih yang mudah. Apakah kita tega membiarkan orang berpenyakit keras terus menderita? Orang tidak lagi meratap agar dia hidup kalau penyakitnya begitu berat, sebaliknya dia meratap agar mati. Demikian penderitaan bisa diterima, tetapi bisa juga ditolak dengan mematikan diri.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Rachels James, *La fine della vita* dalam Nadeak P. Gonzales, OFM Cap. *Lebih Baik Mati? Menyorot Euthanasia* (Bina Media Perintis, Medan, 2004), h. 3-11.

Salah satu pemahaman (dari banyak varian konsep) terhadap penyejahteraan warga negaranya dalam konsep tanggung jawab negara adalah upaya perlindungan hukum bagi warganya sendiri. Artinya, hukum sebagai sarana dan sistem perlindungan bagi rakyat yang efektif, terutama dari berbagai upaya pemaksaan kehendak atau bentuk kekerasan yang dilakukan oleh organ/struktur yang berkuasa. Pendekatan sistem dalam bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Victor M. Tschchikvadse dan Samuel L. Zivs,

*“It is the system approach that makes it possible to visualize more clearly the whole of law as a complex series or relationship between branches of law and legal institutions. The system approach helps to reveal the special quality of law, considered as a whole in comparison with one of its branches or with a simple aggregate of branches. The system approach also makes it possible to reveal more clearly such important features of law as a unity and differentiation, the interaction and interrelation of the separate parts of elements”.*<sup>10</sup>

Ini berarti, pendekatan sistem dalam bidang hukum memperhatikan pula bagaimana organ/struktur negara yang memiliki lembaga-lembaga (pembentuk, penegak) hukum bekerja untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dalam ruang kehidupan warga negaranya. Penelusuran terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi akan menjadi tema penting dilihat sebagai bagian dari kajian sistem ketatanegaraan yang ada. Karena pengalaman bangsa Indonesia yang berulang kali mengalami pergantian dan perubahan UUD, dan pergantian UUD dalam suatu negara, berarti peralihan dari tertib ketatanegaraan yang lama ke tertib ketatanegaraan yang baru, yang tentunya (atau seharusnya) menuju ke arah yang lebih sempurna dibandingkan sebelumnya. Dan ini pulalah yang menjelaskan situasi pendekatan hukumnya pemerintah dalam hak asasi manusia.

---

<sup>10</sup>Victor M. Tschchikvadse cs., *The System of Socialist Law*, International Encyclopedia of Comparative Law, Tübingen, Mouton, The Hague, Paris, J.C. Mohr (Vol. II; Bab 2: Paul Siebeck, 1971), h. 115.

Membicarakan pendekatan hukum, sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat, adalah pendapat Hadjon, yang menyatakan “tindak pemerintahan” sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sifatnya mencegah sengketa. Adanya perlindungan hukum yang preventif tentunya akan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk perlindungan hukum yang represif adalah berdasarkan penyelesaian suatu sengketa, dimana terdapat keragaman dalam berbagai sistem hukum di dunia ini. Misalnya, negara-negara dengan “civil law system” mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum (biasa) dan pengadilan administrasi; sedangkan negara-negara dengan “common law system”, hanya mengenal satu set pengadilan, yaitu “ordinary court”. Di samping kedua sistem tersebut, negara-negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama “Ombudsman”.

Dalam konteks hak-hak asasi manusia, khususnya yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia, kita mengenal adanya lembaga-lembaga yang menjadi sarana perlindungan hak-hak masyarakat. Lembaga-lembaga yang memiliki kewajiban dalam memberikan sarana perlindungan hukum bisa dilakukan oleh lembaga peradilan (*judicial system*) dan lembaga non-peradilan (*non-judicial*

---

<sup>11</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Cet I; Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2.

*system*). Lembaga peradilan yang menangani persoalan hak-hak asasi manusia, khususnya terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum, dan khusus hanya menangani persoalan pelanggaran HAM berat (kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan). Sedangkan persoalan hak-hak asasi manusia lainnya, di luar pelanggaran HAM berat, dikategorikan sebagai tindak kriminal maka akan diselesaikan melalui proses peradilan umum. Dalam perspektif perlindungan publik atas kebijakan atau keputusan administratif pemerintah, maka perlindungan hak asasi manusia bisa diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga lembaga peradilan tersebut merupakan sarana perlindungan hak-hak asasi manusia yang dikenal dalam konteks sistem ketatanegaraan di Indonesia.

### ***C. Euthanasia dan Hak Asasi Manusia (HAM)***

Konstitutionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.<sup>12</sup> Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitutionalisme, dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak – yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan (dan mana pula yang apabila tidak demikian harus dibilang sebagai kesewenang-wenangan) – inilah yang di dalam konsep moral dan metayuridisnya disebut “konstitutionalisme”.<sup>13</sup> Paham ini

---

<sup>12</sup>Staf Pengajar Hukum Tata Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 521.

mengantarkan perdebatan awal dalam sistem ketatanegaraan yang diatur dalam teks hukum dasar sebuah negara, atau disebut konstitusi.

Kutipan fikiran Rousseau di atas, telah mengilhami lahirnya *De Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen*, dan pembentukan Konstitusi Perancis (1791), serta cikal bakal lahirnya berbagai konstitusi modern di dunia. Hak asasi manusia (HAM) mungkin merupakan kata yang telah ditulis dalam ratusan ribu halaman kertas, buku, artikel atau surat kabar dan siaran televisi maupun radio, juga menarik perhatian sejumlah besar ahli, politikus, jurnalis, lawyer dan sebagainya. Ia seolah-olah menjadi "trademark" peradaban modern saat ini. Sebagai basis dari pemikiran manusia, mengarahkan perbuatan manusia dan mengatur masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Bab III (Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia) bagian kesatu, hak untuk hidup, Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup tentaram, aman, damai, bahagiah, sejaterah lahir batin; ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkunag hidup yang baik dan sehat. Pada dasarnya pasal –pasal tersebut di atas justru menghargai dan mengedepankan hak asasi manusia untuk hidup bukan sebaliknya.

Penghormatan atas hak pasien nasib sendiri dan mengakhiri penderitaannya masih memerlukan pertimbangan dari seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam proses penyembuhan pasien. Hal ini mengharuskan dokter dan tenaga kesehatan lain mendahulukan proses pembantuan keputusan yang normal dan

berusaha bertindak sesuai dengan kemauan pasien sehingga keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan yang matang.<sup>14</sup>

Nayawa manusia itu sacral dan tak bias dilanggar dan tiap usaha harus dibuat untuk melindunginya. Pada khususnya setiap orang tidak boleh dilukai atau dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum baik ketika hidup di dunia ini maupun sesudahnya, kesucian nyawa (jiwa) manusia tidak dapat dilanggar. Bahkan orang-orang beriman berkewajiban memperlakukan jasad orang meninggal dengan perlakuan yang baik. Manusia lahir dalam keadaan merdeka.

Kebebasan tidak boleh dianggar kecuali dengan alasan dan melalui proses hukum; setiap orang dan setiap bangsa memiliki hak kebebasan dalam segala bentuknya – kebebasan fisik, cultural, ekonomi, dan politik – dan dia harus berjuang dengan segala cara untuk melawan pelanggaran atau abrogasi terhadap hak ini; dan setiap orang atau bangsa yang teraniaya (tertindas) mempunyai klaim abash untuk membantu orang lain dan/ atau bangsa yang memperjuangkan kebebasan itu.<sup>15</sup>

Babberapa pasien tidak dapat menentukan pilihan pengobatan sehingga harus orang lain yang memutuskan apa tindakan yang terbaik bagi pasien. Orang lain di sini tentu dimaksudkan orang yang paling dekat dengan pasien, dan dokter harus menghargai pendapat orang-orang dekat pasien tersebut.<sup>16</sup> Hak-hak asasi manusia sebagaimana dikenal dewasa ini dengan nama antara lain "human rights, the Right of man" hal mana pada prinsipnya dapat dirumuskan sebagai "hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena

---

<sup>14</sup> Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 54-55.

<sup>15</sup> Badri Khaeruman, *op. cit.*, h. 307-308.

<sup>16</sup> Ns. Ta'adi, *op. cit.*, h. 55.

itu bersifat suci". Jadi, hak asasi dapat dikatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir.

Hak asasi itu tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Dari pemahaman yang demikian maka sebenarnya perjuangan untuk membela hak-hak kemanusiaan tersebut mungkin seumur umat manusia itu sendiri. Islam mengajarkan belas kasihan sebagai suatu nilai kemanusiaan yang pokok dan satu dari kebajikan yang fundamental bagi orang yang mengaku dirinya muslim.

Selain dalam bentuknya yang tertulis, konstitusi-konstitusi modern di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada suatu idealitas sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Indonesia yang memiliki konsepsi hak-hak asasi manusia dalam hukum dasarnya sejak tahun 1945, menunjukkan adanya corak konstitusionalisme yang dibangun dan terjadi konteksnya pada saat menginginkan kemerdekaan atau lepasnya dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain, atau bisa disebut memiliki corak konstitusionalisme yang anti kolonialisme. Dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat tahun 1945, telah dicantumkan hal tersebut dalam Pembukaan-nya alinea 1, yang menegaskan: *Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa*



*dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Alinea tersebut merupakan penanda, bahwa bangsa Indonesia sedang berkeinginan membawa rakyatnya terbebas dari segala bentuk penjajahan, dengan harapan lebih mengupayakan terciptanya sendi-sendi kemanusiaan dan keadilan. Konsepsi ini merupakan konsepsi awal, dimana penegasan hak-hak asasi manusia ditujukan tidak hanya bagi bangsa Indonesia yang saat itu baru merdeka, tetapi ditujukan untuk seluruh bangsa di dunia ini. Secara substansi, hak-hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi tertulis di Indonesia senantiasa mengalami perubahan seiring dengan konteks perubahan peta rezim politik yang berkuasa.

## BAB IV

### EUTHANASIA DALAM HUKUM ISLAM

#### *A. Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam*

Kematian yang diidamkan oleh pada penderita, sudah barang tentu, adalah kematian yang normal pada umumnya, jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Kematian inilah yang dalam istilah medis disebut euthanasia yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh. Euthanasia sebenarnya bukanlah merupakan suatu persoalan yang baru. Bahkan euthanasia telah ada sejak zaman Yunani purba.

Agama Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia secara konsisten. Hak hidup adalah hak asasi setiap orang yang tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berlaku umum tanpa membedakan pembunuhan yang terjadi tanpa persetujuan korban maupun dengan persetujuan korban sendiri, termasuk juga tindakan bunug diri dengan alasan apapun.

Berbagai literature kepidanaan ditumukan beberapa istilah yang sering digunakan untuk memberikan makna suatu upaya pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar peraturan Undang-Undang yang telah ada. Istilah-istilah itu antara lain hukuman, sangsi, sangsi pidana, pidana, ancaman pidana. Dalam hokum Islam terhadap istilah: *'uqubah, mukhalafh, hukumah, qishash, hudud, takzir, jaza, kafarat dan diat*.<sup>1</sup> Para ahli berpendapat kedudukan hokum sebagai inti peradaban suatu bangsa yang paling murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sabri Samin, *loc. cit.*, h. 45.

<sup>2</sup>Badri Khaeruman, *op. cit.*, h. 11.

Dalam syariat Islam memang ada alasan sah yang membolehkan mengakhiri hidup orang lain, yaitu karena yang bersangkutan membunuh orang lain secara melawan hukum, orang yang sudah menikah melakukan perzinaan atau murtad. Dengan demikian dokter yang memberikan suntikan obat berdosisi tinggi dengan tujuan untuk mempercepat kematian pasiennya adalah termasuk tindakan pembunuhan yang terlarang. Karena yang berhak menentukan cepat atau lambatnya ajal adalah merupakan hak prerogatif Allah, Apabila. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa euthanasia aktif haram hukumnya sedangkan euthanasia pasif dibolehkan karena pada hakekatnya tidak ada keterlibatan langsung dokter dalam kasus terjadinya kematian penderita. Kematian yang dialaminya disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, bukan karena akibat tindakan dokter. Hal penting yang perlu dikemukakan berkaitan dengan pembedaan dalam Islam bahwa saksi pidana harus sesuai dengan hukum Allah swt, Q.S. Al-Maidah/ 5: 44:

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

*...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.<sup>3</sup>*

Para penegak hukum, (polisi jaksa, advokad, dan hakim) harus mengetahui bahwa sanksi pidana dalam Islam bersumber dalam al-Qur'an, hadis dan ijmak" atau bersumber dari *ulul amri* (penguasa), suatu peraturan perUndang-undangan yang disusun dan disahkan oleh penguasa (lembaga legislative dan eksekutif) peraturan perUndang\_undangan itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 227

<sup>4</sup>Sabri Samin, *op. cit.*, h. 50.

Syariat Islam menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup bagi manusia. Setiap perbuatan menghilangkan hidup, baik oleh orang lain maupun oleh diri sendiri dilarang dengan tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kitab suci Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang melarang pembunuhan, bahkan mengancamnya dengan hukuman. Ayat-ayat itu antara lain Q.S. Al-Nisa/4: 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

*Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>5</sup>

Di samping melarang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain, syariat Islam juga melarang untuk melakukan perbuatan bunuh diri, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Nisa ayat/4: 29:

.....وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*...dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>6</sup>

Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa euthanasia khususnya euthanasia aktif di mana seorang dokter melakukan upaya aktif membantu untuk mempercepat kematian seorang pasien, yang menurut perkiraannya sudah tidak dapat bertahan untuk hidup, meskipun atas permintaan si pasien atau

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 183

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 163.

keluarganya dilarang menurut hukum Islam, karena perbuatan tersebut tergolong pada pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan yang dibolehkan oleh Islam hanyalah pembunuhan yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina muhsan, hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan sengaja dan hukum bunuh bagi orang yang murtad dan pengganggu keamanan. Sedangkan euthanasia tidak termasuk dalam jenis ini.

Oleh sebab itu, tindakan euthanasia menurut hukum Islam dianggap sebagai perbuatan terlarang, hukumnya haram. Penafsiran pembunuhan yang dibolehkan menurut hadis Nabi, telah dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya pembunuhan yang dibolehkan oleh *syara'* (Islam) dapat dirumuskan dalam tiga segi:

1. Segi pelaksanaan perintah atau kewajiban, seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah pengadilan atau hakim.
2. Segi pelaksanaan hak, yang meliputi:
  - a. Hak wali si korban untuk melaksanakan hukuman qishash.
  - b. Hak penguasa untuk menghukum bunuh perampok/pengganggu stabilitas keamanan.
3. Segi pembelaan baik terhadap diri, kehormatan, maupun terhadap harta benda.<sup>7</sup>

Dari tiga segi pembunuhan yang dibolehkan yang dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syaltut di atas, euthanasia tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, euthanasia aktif jelas dilarang oleh Islam.

---

<sup>7</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Mesir: Dar Al-Qalam, 1966), h. 348.

Adapun euthansia aktif yang dilakukan oleh seorang dokter dalam rangka menyelamatkan ibu yang telah melahirkan dengan jalan mematikan bayi yang akan dikandungnya, pada saat diketahui proses kelahiran bayi itu mengakibatkan hilangnya nyawa si ibu, ini dibolehkan karena darurat berdasarkan kaidah

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

*Keadaan darurat dapat membolehkan perbuatan yang dilarang.*

Selain daripada itu juga berdasarkan kaidah:

اِزْتِكَابُ أَحْفَ الضَّرُورَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya:

*Menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya itu adalah wajib.*

Jadi Islam membolehkan untuk melakukan euthanasia aktif dengan mengorbankan janin karena menyelamatkan nyawa ibu. Nyawa ibu diutamakan, mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama makhluk, sedangkan si janin (bayi), sebelum ia lahir dalam keadaan hidup, ia belum mempunyai hak seperti hak waris dan belum mempunyai kewajiban apapun.

Sehubungan dengan pengaruh keadaan darurat tersebut Abd Wahhab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh mengatakan yang artinya sebagai berikut: Barang siapa yang tidak bisa mempertahankan keselamatan dirinya kecuali dengan cara menyelamatkan membinasakan orang lain, tidaklah ia berdosa dalam tindakannya itu.<sup>8</sup> Selanjutnya bertalian dengan masalah persetujuan yang diberikan oleh seorang dokter untuk membantu mempercepat kematiannya dianggap tidak ada, tetapi

---

<sup>8</sup>Abd Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet.VIII: Al-Dar Al-Kuwaitiyyah, 1986), h 208.

dokter yang melakukan euthanasia dianggap melakukan tindakan pidana atau kriminal yang harus dijatuhi hukuman. Hanya saja mengenai jenis hukumannya ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku euthanasia (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar diyat (membayar 100 ekor unta atau seharga itu) dan bukan qishash, dengan alasan, bahwa persetujuan si korban (pasien) untuk menjadi objek euthanasia merupakan syubhat dalam status perbuatannya dan dalam hadis Nabi SAW, yaitu apabila dalam jarimah hudud (termasuk didalamnya qishash) terdapat syubhat maka hukuman bisa digugurkan atau diganti.

Menurut Zufar salah seorang murid Abu Hanifah dan pendapat yang kuat adalah mazhab Maliki serta pendapat sebagian ulama Syafi'iyah hukuman yang dikenakan kepada pelaku euthanasia tersebut diatas, tetap hukuman qishash (hukuman mati) karena persetujuan untuk menjadi objek euthanasia tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa pelaku euthanasia atas persetujuan si korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan pasien untuk menjadi objek euthanasia, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman qishash, maupun diyat maka dia bebas dari hukuman.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Abdul Qadir Audah, *As Tasyri' Al Jinairy Al Islamy* (Jilid 1; Beirut Dar Al Kitab Al Arabiyu, Th.th), h. 441-442.

Kemudian bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang euthanasia pasif? Menurut ajaran Islam, bahwa sakit yang menimpa seseorang itu dapat menghapuskan dosa. Meskipun demikian, bukan berarti penyakit yang menimpa seseorang itu dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan karena agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW menurut Iman Al-Syaukany, bahwa penyakit yang oleh dokter telah dinyatakan tidak ada obatnya sekalipun, tidak ada upaya untuk mengupayakan pengobatannya.<sup>10</sup>

Apabila dokter mengatakan, bahwa penyakit tersebut sudah tidak bisa disembuhkan atau keadaanya sudah masuk dalam stadium terminal dan pihak pasien atau keluarganya dengan beberapa pertimbangan meminta atau menyetujui dihentikannya upaya pengobatan, maka penghentian pengobatan pasien tersebut akhirnya meninggal. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, tindakan yang bisa dilakukan ialah bersabar dan tawakal serta berdoa kepada Allah SWT.<sup>11</sup>

Syariah Islam merupakan syariah sempurna yang mampu mengatasi segala persoalan di segala waktu dan tempat. Berikut ini solusi syariah terhadap euthanasia, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif.

#### 1. Euthanasia Aktif

Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amad), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas

---

<sup>10</sup>Al-Syaukany, *Nail Al-Authar* (Jilid IX; Saudi Arabia: Idarah Al-Buhuts Al-Islamiyah, T.th), h. 91.

<sup>11</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masailul Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2009), h.113.



permintaan pasien sendiri atau keluarganya. Dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil yang mengharamkan pembunuhan, sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Nisaa'/4: 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً

Terjemahnya:

*Dan tidak layak bagi seorang muslim membunuh seorang muslim (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).*<sup>12</sup>

Q. S Al-Nisaa'/4: 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>13</sup>

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif. Sebab tindakan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-'amad) yang merupakan tindak pidana (jarimah) dan dosa besar. Dokter yang melakukan euthanasia aktif, misalnya dengan memberikan suntikan mematikan, menurut hukum pidana Islam akan dijatuhi qishash (hukuman mati karena membunuh), oleh pemerintahan Islam (Khilafah), sesuai firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, Telah diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 183.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 163.

Namun jika keluarga terbunuh (waliyyul maqtuul) menggugurkan qishash (dengan memaafkan), qishash tidak dilaksanakan. Selanjutnya mereka mempunyai dua pilihan lagi, meminta diyat (tebusan), atau memaafkan/menyedekahkan, firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 178:

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ

Terjemahnya:

*Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).<sup>15</sup>*

Tidak dapat diterima, alasan euthanasia aktif yang sering dikemukakan yaitu kasihan melihat penderitaan pasien sehingga kemudian dokter memudahkan kematiannya. Alasan ini hanya melihat aspek lahiriah (empiris), padahal di balik itu ada aspek-aspek lainnya yang tidak diketahui dan tidak dijangkau manusia. Dengan mempercepat kematian pasien dengan euthanasia aktif, pasien tidak mendapatkan manfaat (hikmah) dari ujian sakit yang diberikan Allah kepadanya, yaitu pengampunan dosa.

## 2. Euthanasia Pasif

Hukum euthanasia pasif, sebenarnya faktanya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 51.

<sup>15</sup>*Ibid.*,

memberikan harapan sembuh kepada pasien. Bagaimanakah hukumnya menurut Syariah Islam? Jawaban untuk pertanyaan itu, bergantung kepada pengetahuan kita tentang hukum berobat (*at-tadaawi*) itu sendiri. Yakni, apakah berobat itu wajib, mandub, mubah, atau makruh? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama, mengobati atau berobat itu hukumnya mandub (*sunnah*), tidak wajib. Namun sebagian ulama ada yang mewajibkan berobat, seperti kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah, seperti dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Qadim Zallum hukum berobat adalah mandub. Tidak wajib. Hal ini berdasarkan berbagai hadits, di mana pada satu sisi Nabi SAW menuntut umatnya untuk berobat, sedangkan di sisi lain, ada *qarinah* (indikasi) bahwa tuntutan itu bukanlah tuntutan yang tegas (*wajib*), tapi tuntutan yang tidak tegas (*sunnah*).<sup>17</sup> Hadits di atas menunjukkan Rasulullah saw memerintahkan untuk berobat. Menurut ilmu Ushul Fiqih, perintah (*al-amr*) itu hanya memberi makna adanya tuntutan (*li ath-thalab*), bukan menunjukkan kewajiban (*li al-wujub*). Ini sesuai kaidah ushul: *Al-Ashlu fi al-amri li ath-thalab*. Jadi, hadits riwayat Imam Ahmad di atas hanya menuntut kita berobat.

Disamping itu, Al-Qardhawi mengutip pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi sisakit. Sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah. Sebagian kecil menganggapnya *sunnah*, dan sebagian kecil lagi lebih sakit dari golongan kedua berpendapat wajib. Setelah mengutip pendapat para fuqaha Al-Qardhawi sependapat dengan golongan ulama yang mewajibkan berobat

---

<sup>16</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 180.

<sup>17</sup>Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati. Bungil* (Jakarta: al Izzah, 1998), h. 68.

apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan ketentuan Allah swt.<sup>18</sup>

Dengan demikian, jelaslah pengobatan atau berobat hukumnya sunnah, termasuk dalam hal ini memasang alat-alat bantu bagi pasien. Jika memasang alat-alat ini hukumnya sunnah, apakah dokter berhak mencabutnya dari pasien yang telah kritis keadaannya? Jawabannya adalah boleh jika memang tidak tersembuhkan lagi secara kedokteran.

Apabila sipenderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan – dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glucose, dan sebagainya atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, melanjutkan pengobatan itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib dan sunnah. Al-Qardhawi tidak setuju menyebut kematian seperti tersebut dengan istilah kematian karena kasih sayang (*qatl ar-rahmah*), namu ia telah suka disebut dengan istilah memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*).<sup>19</sup>

#### **B. Hubungan Euthanasia dengan Jarimah**

Tindakan *euthanasia* dalam hukum Islam belum jelasan dalam hal pengkategorian tindakan pembunuhan yang merupakan suatu *jarimah*. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur – unsur *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam dikenal dua unsur *jarimah* yaitu *jarimah* umum dan khusus. Yang dimaksud dengan unsur-unsur

---

<sup>18</sup> Badri Khaeruman, *op. cit.*, h. 212.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 212-213.

umum yaitu unsur-unsur yang terdapat pada setiap *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur yang hanya ada pada jenis *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Sekiranya dapat dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan, dan pelaku dimungkinkan dihukum sesuai dengan hukum *jarimah* yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam *qishash*, antara lain:

1. Pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat, dan berakal;
2. Ada kesengajaan membunuh;
3. *Ikhtiyar* (bebas dari paksaan);
4. Pembunuh bukan anggota keluarga korban;
5. *Jarimah* dilakukan secara langsung.<sup>20</sup>

Antara pembunuhan sengaja dengan euthanasia aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski secara teknis ada persamaan. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan. Sedangkan dalam euthanasia aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana. Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien.

Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidakjelasan kedudukan pelaku euthanasia dalam *jarimah*. Oleh karena itu yang menjadi persoalan

---

<sup>20</sup> Ahmad Azar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h 16.

adalah apakah dari segi hukum pidana Islam melakukan tindakan euthanasia dapat dikategorikan telah melakukan jarimah.

Adapun yang termasuk unsur umum *jarimah* adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa *jarimah* tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash.
2. Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan.
3. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat. Dengan kata lain, unsur ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan atas orang mukallaf dalam keadaan bebas dari unsur keterpaksaan atau ketidaksadaran penuh.

Unsur khusus dar *jarimah* merupakan unsur yang membedakan antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain. Misalnya unsur jarimah pembunuhan akan berbeda dengan unsur *jarimah* pencurian, zina dan sebagainya. Dalam hukum Islam, pembunuhan dikenal ada tiga macam, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pembunuhan sengaja (*Al-qathl al'amd*), yaitu suatu perbuatan yang direncanakan dahulu dengan menggunakan alat dengan maksud menghilangkan nyawa.
- b. Pembunuhan semi sengaja (*Al-qathl sibhu al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 8

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2000), h. 123.

- c. Pembunuhan karena kesalahan (*Al-qathl al-khatta*), yaitu pembunuhan yang terjadi karena adanya kesalahan dan tujuan perbuatannya.

Dalam Hukum Islam, hingga saat ini belum ada kejelasan atau kepastian tentang eksistensi euthanasia, apakah euthanasia itu termasuk dalam jarimah atau bukan. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pasal 344 KUHP, dimana dijelaskan bahwa melakukan euthanasia merupakan suatu tindakan pidana.<sup>23</sup> Pasal 344 KUHP tersebut menyatakan secara tegas: barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara, paling lama dua belas tahun.<sup>24</sup>

Di Indonesia masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, akan tetapi hasilnya masih belum ada kesepakatan mengenai masalah tersebut.<sup>25</sup> Demikian juga dari sudut pandang Agama, ada sebagian ulama yang membolehkan dan sebagian melarang tindakan *euthanasia*, disertai dengan berbagai argument. Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, 1 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. KH. Ibrahim Husein menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS di *euthanasia* jika memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>23</sup>Natangsa Surbakti, *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern, Dalam Jurnal Hukum* (Vol. I No. 1 Maret 1998, FH. UMS), h. 115.

<sup>24</sup>Moeljanto, *KItab Undang-Undang Hukum Pidana* (Yogyakarta: UGM, 1978), h. 124.

<sup>25</sup>Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer* (Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 51.

1. Obat atau vaksin tidak ada.
2. Kondisi kesehatannya makin parah.
3. Atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter.
4. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.<sup>26</sup>

Masifuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah, tetapi tidak boleh dicuthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan.<sup>27</sup> Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam Q.S. Al-Mulk/67: 2:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Terjemahannya:

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.*<sup>28</sup>

Tetapi pengalaman juga menunjukkan bahwa ketika hal yang tidak secara tegas dilarang dalam kitab-kitab suci dan dinyatakan terlarang menurut pandangan para ulama, suatu saat dapat berubah. Pro dan kontra terhadap tindakan *euthanasia* hingga saat ini masih terus berkembang.<sup>29</sup> Namun akan timbul berbagai permasalahan ketika *euthanasia* didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama, khususnya agama Islam. Meskipun dalam hukum Islam belum ada kejelasan atau ketidakpastian dalam menentukan apakah euthanasia termasuk jarimah atau bukan, akan tetapi dalam hal euthanasia aktif yang dilakukan hanya

---

<sup>26</sup>Masifuk Zuhdi, *Penderita AIDS Tidak Boleh Dicuthanasia, Dalam Mimbar Hukum* (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), h. 28.

<sup>27</sup> *Ibid.* h. 29.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 1121.

<sup>29</sup> Akh. Fauzi Ascri, *op.cit.*, h. 51.



berdasar inisiatif dokter sendiri tanpa adanya persetujuan dari pasien. Sekiranya dapat dimasukkan dalam kategori *jarimah* pembunuhan, dan pelaku dimungkinkan dihukum sesuai dengan hukum jarimah yang ada. Pendapat demikian didasarkan atas pertimbangan karena perbuatan itu telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dilaksanakan dalam qishash, antara lain:

1. Pembunuhan adalah orang yang baligh, sehat dan berakal
2. Ada kesenjangan membunuh
3. Ikhtiyar (bebas dari paksaan)
4. Pembunuh bukan anggota keluarga korban
5. Jarimah dilakukan secara langsung.<sup>30</sup>

Antara pembunuhan sengaja dengan euthanasia aktif ada suatu perbedaan yang mendasar, meski secara teknis ada persamaan. Dalam pembunuhan sengaja, terdapat suatu maksud atau tujuan yang cenderung pada tindak kejahatan. Sedangkan dalam euthanasia aktif, pengakhiran hidup pasien dilakukan secara sengaja dan terencana.

Namun pembunuhan ini dilakukan atas kehendak dan permintaan pasien atau korban kepada dokter yang merawat dan maksud atau tujuan yang terdapat di dalamnya cenderung pada suatu pertolongan, yang dalam hal ini menolong meringankan beban yang diderita oleh pasien. Perbedaan yang mendasar itulah yang menyebabkan adanya ketidak jelasan kedudukan pelaku euthanasia dalam jarimah. Oleh karena itu yang menjadi persoalan adalah apakah dari segi hukum pidana Islam melakukan tindakan euthanasia dapat dikategorikan telah melakukan jarimah.

---

<sup>30</sup> Ahmad Azar Basyir, *op. cit*, h. 16.

### C. *Sanksi hukum bagi pelaku euthanasia*

Dalam ajaran agama Islam tidak terdapat ajaran yang mutlak mengenai euthanasia, namun bila ingin mempelajari dan memahami arti euthanasia secara mendalam, maka akan jelas hukumnya dengan berdasarkan al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam. Euthanasia hakikinya adalah membunuh yang dilakukan dalam rumah sakit oleh dokter ahli pada penderita karena penyakit tertentu seperti kanker atau kecelakaan yang merusak tubuhnya hingga berdasarkan ilmu dan teknologi kedokteran tidak mungkin sembuh.

Agar manusia tidak memandang murah terhadap jiwa manusia, maka Allah memberikan ancaman bagi mereka yang meremehkannya. Tindakan merusak ataupun menghilangkan jiwa orang lain maupun jiwa diri sendiri adalah perbuatan melawan hukum Allah. Euthanasia merupakan salah satu bentuk pembunuhan dan termasuk dalam kategori jinayat. Dalam terminologi fiqh, jinayat adalah setiap perbuatan yang diharamkan dan tercela yang dilarang oleh Tuhan, perbuatan itu bisa merugikan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>31</sup>

Secara tegas Allah menerangkan tentang larangan untuk melakukan pembunuhan, karena pada dasarnya menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan dosa besar sebagai mana tercantum dalam firman Allah Q.S. Al-Nisa/4: 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

---

<sup>31</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa H. A Ali (Bandung: Al-Maarif, 1997), h. 11

*Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.*<sup>32</sup>

Secara umum hukum Islam diamalkan untuk menciptakan kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, sehingga aturan diberikan secara rinci, khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, Islam ditetapkan aturan yang ketat yaitu Qisas (pembunuhan), had dan diyat. Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardawi, sebagaimana dikutip oleh Akh. Fauzi Aseri mengemukakan, bahwa kehidupan manusia bukan menjadi hak milik pribadi, sebab dia tidak dapat menciptakan dirinya (jiwanya), organ tubuhnya, ataupun sel-selnya.

Diri manusia pada hakekatnya adalah barang ciptaan yang diberikan Allah, oleh karenanya ia tidak boleh diabaikan, apalagi dilepaskan dari kehidupannya.<sup>33</sup> Jadi jelaslah bahwa Islam tidak membenarkan seseorang yang sakit berkeinginan mempercepat kematiannya, baik dengan bunuh diri maupun dengan minta dibunuh. Bahkan berdo'a meminta dimatikanpun tidak diperbolehkan. Tetapi Allah menyuruh umatnya bila dalam keadaan sakit agar disamping berusaha juga berdoa agar diberi kesembuhan, sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Syu'ara'/26: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

*Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku.*<sup>34</sup>

Ahmad Mustafa al-Maragi menjelaskan, bahwa pembunuhan (mengakhiri hidup) seseorang bisa dilakukan apabila disebabkan oleh salah satu dari tiga sebab:<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 183.

<sup>33</sup> Akh Fauzi Aseri, *op. cit.*, h. 73.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 737.

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1971), h.

1. Karena pembunuhan oleh seseorang secara zalim.
2. Janda yang pernah bersuami) secara nyata berbuat zina, yang diketahui oleh empat orang saksi.
3. Orang yang keluar dari agama Islam, sebagai suatu sikap menentang jama'ah Islam.

Jika dibandingkan dengan alasan-alasan yang mendorong terjadinya euthanasia seperti disebutkan terdahulu, maka tidak ada satupun yang berkaitan dengan alasan *bilhaq* di atas. Maka agar dapat ditentukan sanksi hukumnya dalam masalah euthanasia ini, perlu diperjelas secara terperinci karena masalah euthanasia ini merupakan masalah yang kompleks, baik dari segi sebabnya maupun pelaku terjadinya euthanasia.

Karena euthanasia ini merupakan jenis pembunuhan maka kiranya perlu dijelaskan sanksi-sanksinya. Sebelum menginjak kepada sanksi-sanksi pelaku euthanasia perlu disebutkan terlebih dahulu sanksi-sanksi dalam pembunuhan. Dalam pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu; hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah qisas. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah diyat. Akhirnya jika sanksi qisas atau diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, ta'zir tadi ditambah kaffarah. Hukuman tambahan sehubungan dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> A. Djazuli, *op. cit.*, h. 135-136.

Dokter sebagai seorang anggota masyarakat, penuh aktif, berinteraksi dan memelihara masyarakat. Tugas dokter tidak hanya melakukan pengobatan penyakit dan mencegah timbulnya penyakit. Tetapi juga sebagai seorang manusia dokter juga dituntut untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan apapun bentuknya.<sup>37</sup> Dalam masalah euthanasia ini, jika melihat kembali kepada fungsi dokter sebagai penolong untuk mengobati, menolong dan membantu pasien dari penyakitnya supaya sembuh, apakah secara batin dia tega melakukan euthanasia terhadap pasiennya. Pasti dia mempunyai tekanan batin dan juga menghadapi konsekuensi hukum.

Dalam hal ini, jika dokter melakukan euthanasia berarti dokter telah melakukan pembunuhan, karena pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang, seperti dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili:<sup>38</sup> "Pembunuhan adalah suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa; artinya pembunuhan itu dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan."

Allah telah memberikan hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan qisas. Hal ini tercantum dalam firman Allah swt, Q.S. Al-Baqarah/ 2: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ  
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

---

<sup>37</sup>Kode Etik kedokteran Islam, Terj. Sudibyo Soepardi (Cet. IV; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h. 41.

<sup>38</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 217.

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>39</sup>*

Q.S. Al-Maidah/5: 45:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ  
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>40</sup>*

Jadi berdasarkan ayat di atas dokter sebagai pelaku pembunuhan harus dihukum qisas, hal ini sebagai konsekuensi pertama yang dihadapi oleh dokter sebagai pihak pembunuh. Pada dasarnya Allah melarang pembunuhan apapun jenisnya, dan Allah memberikan hukuman berupa qisas yang merupakan hak Allah swt. atas manusia karena sebagai Sang Khaliq menyuruh umatnya agar senantiasa memelihara jiwa, sebagai unsur utama kehidupan manusia. Dalam hal ini si pasien sebagai pemilik jiwa telah merelakan atau memberi izin kepada dokter.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 51

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 227.

Masalah yang timbul adalah, apakah pelaku (dokter) terkena hukuman atau tidak dalam kasus euthanasia yang mana si korban sebagai pemilik jiwa, atau keluarga sebagai wali ad-dam telah merelakan bahkan menganjurkannya. Dalam hal ini Mahmud Syaltut memberikan pembahasan yang ringkasnya bahwa para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai suatu kejahatan atau seseorang yang disuruh sendiri oleh si korban dengan disetujui walinya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perintah korban dapat menggugurkan qisas terhadap pelaku.<sup>41</sup>

Menurut Hanafiyah:

يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بَرَضًا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

Gugurnya qisas disebabkan oleh adanya kerelaan atau izin korban yang dapat dipersamakan dengan pemaafan. Oleh karena itu, hukuman berpindah kepada diyat. Selain itu, kerelaan itu menjadi syubhat yang dapat menggugurkan hudud.<sup>42</sup> Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad mereka sama-sama memberikan sanksinya berupa diyat, karena adanya pemberian izin, dan pemberian izin itu menimbulkan syubhat (kesamaran).<sup>43</sup>

Kerelaan korban dapat dipersamakan dengan pemaafan baik dari hukuman asli (qisas) maupun penggantinya (diyat). Pemaafan dari korban itu lebih utama dari pada keluarga sebab pemaafan itu menjadi hak bagi korban. Menurut ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam kasus euthanasia ini tidak ada sanksi qisas dan

---

<sup>41</sup> Akh. Fauzi Aseri, *op. cit.*, h.74.

<sup>42</sup> Abdul Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Muassasat ar-Risalat, 1992), h. 440-441.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 441-442.

diyat, meskipun tidak berarti menghapuskan hukuman ta'zir. Karena si pasien telah memaafkan dari sanksi dan rela untuk dibunuh itu sama dengan memberi maaf.<sup>44</sup>

Dari pendapat-pendapat di atas, semuanya tidak ada yang menetapkan sanksi hukum atas kerelaan atau izin ini dengan sanksi qisas (hukuman asli), walaupun Abu Hanifah (beserta pengikutnya) Abu Yusuf dan Muhammad menetapkan hukum atas adanya unsur kerelaan ini dengan diyat (hukuman pengganti). Diyat ada dua macam yaitu diyat mugalazah dan diyat mukhafafah. Menurut Malikiyah pada pembunuhan disengaja dikenakan diyat mugalazah apabila waliyuddam menerimanya. Dan jumlah dari pembayaran diyat mugalazah adalah seratus ekor unta yang empat puluh di antaranya sedang bunting.

Dari hal ini, jika melihat hal di atas berarti dokter yang mengeuthanasia mendapat hukuman berupa diyat mughaladzhah karena telah dimaafkan oleh pihak keluarga, tetapi dalam hal ini apakah dokter sebagai orang lain bagi pasien dan keluarga yang sudah melaksanakan euthanasia atas permintaan pasien dan persetujuan keluarga sehingga mendapat hukuman diyat, mau menerima hukuman tersebut, jika dia sudah tahu akan konsekuensinya. Sedangkan jumlah yang harus dikeluarkan dari ketentuan diyat sendiri tidak sedikit, yaitu berupa seratus ekor unta yang empat puluh diantaranya sedang bunting, atau harta (uang atau barang ) yang senilai dengannya.

Otomatis dokter tidak akan mau jika harus membayar diyat, karena berarti dokter sebagai pihak yang membantu malah mendapatkan kerugian. Jadi dari hal ini dokter terbebas dari hukuman qisas (sebagai hukuman asli) juga diyat (sebagai hukuman pengganti). Karena fungsi diyat adalah untuk kemaslahatan keluarga si

---

<sup>44</sup>A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 191.



pasien (si terbunuh). Sedangkan tindakan dokter telah disetujui pihak keluarga pasien. Dan pihak keluarga atau ahli warisnya juga telah memaafkan secara mutlak maka tidak ada hukuman diyat baginya.

Pada dasarnya hukuman qisas tidak dapat diganti dengan hukuman yang dibuat oleh manusia, namun pihak korban atau ahli warisnya diberi hak tuntutan, oleh karena itu hak Allah yang berupa qisas dapat diganti dengan hukuman diyat yang merupakan hak manusia. Adanya hukuman pengganti pada jarimah qisas ini disebabkan adanya pemaafan dari sikorban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu dimungkinkan, sebab jarimah qisas merupakan hak adami hak perseorangan. Oleh karena itu, kalau sikorban (masih hidup) atau ahli waris (jika korban mati) memaafkan pembuat jarimah, hukuman qisaspun menjadi gugur digantikan dengan hukuman diyat. Apabila korban atau keluarganya memaafkan diyat ini, dapat dihapus dan sebagai penggantinya hakim akan menjatuhkan hukuman ta'zir.<sup>45</sup> Singkatnya, sanksi ta'zir dapat dijatuhkan terhadap pembunuh, maka sanksi qisas tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

Dalam tindak pidana pembunuhan, hukum Islam memberikan kedudukan kepada keluarga korban secara bijaksana untuk turut ambil bagian di dalam menentukan kebijaksanaan hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan memberikan kesempatan kepada pelakunya apakah harus diqisas atau diyat, atau juga memberi maaf secara mutlak. Dengan melihat bahwa izin (persetujuan) dapat menghapuskan hukuman, maka izin tersebut merupakan pemaafan yang didahulukan.

---

<sup>45</sup>Rahmat Hakim, *op. cit.*, h. 126.

Hukuman ta'zir yang diberikan kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari qisas dan diyat adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya berurusan dengan hak perseorangan, melainkan juga hak jamaah. Maka ta'zir itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Dan ta'zir itu tergantung kepada kemaslahatan.

### التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya sehingga setiap bentuk kejahatan baru yang dianggap telah merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum.<sup>46</sup> Keterlibatan keluarga pihak korban, ini sangat berarti bagi pelaku tindak pidana maupun bagi keluarga si korban. karena korban (si pasien) atau walinya mempunyai hak untuk membebaskan pembunuh dari sanksi hukuman qisas dan diyat, baik kedua-duanya atau diganti dengan sanksi lain.

---

<sup>46</sup>A. Djazuli, *op. cit.*, h. 162.

## BAB V

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Euthanasia artinya mati yang baik tanpa melalui proses kematian dengan rasa sakit atau penderitaan yang berlarut-larut. Dalam Kamus Inggris-Indonesia disebutkan, bahwa euthanasia termasuk kata benda yang berarti tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat. Dalam istilah medis, Euthanasia berarti membantu mempercepat kematian agar tebebas dari penderitaan. Euthanasia dalam pandangan Islam tidak diperbolehkan, kematian merupakan ketetapan dari Allah SWT, setiap insan yang hidup pasti akan meninggal nantinya. Adapun yang diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas dalam keadaan darurat sebagaimana penyelamatan seorang ibu daripada bayi yang dikandungnya.

Agama Islam sangat menekankan perlindungan terhadap jiwa manusia secara konsisten. Hak hidup adalah hak asasi setiap orang yang tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini berlaku umum tanpa membedakan pembunuhan yang terjadi tanpa persetujuan korban maupun dengan persetujuan korban sendiri, termasuk juga tindakan bunug diri dengan alasan apapun. Berbagai literature kepidanaan ditumukan beberapa istilah yang sering digunakan untuk memberikan makna suatu upaya pembalasan terhadap perbuatan yang melanggar peraturan Undang-Undang yang telah ada. Istilah-istilah itu antara lain hukuman, sangsi, sangsi pidana, pidana, ancaman pidana. Dalam hukum Islam terhadap istilah: *'uqubah, mukhalafh, hukumah, qishash, hudud, takzir, jaza, kafarat dan diat*.

Euthanasia merupakan perbuatan yang terlarang karena dikategorikan sebagai suatu pembunuhan atas nyawa seseorang dan terhadap pelakunya diancam

pidana, tetapi bukan mustahil jika selama ini euthanasia telah banyak terjadi di Indonesia, walaupun hal tersebut dilakukan secara diam-diam. Pada kenyataannya, semakin lama ternyata tindakan euthanasia menjadi suatu "kebutuhan" dalam beberapa kasus tertentu mengenai penderitaan pasien atas penyakit tak tersembuhkan yang dideritanya. Memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya masih menjadi perdebatan yang sengit bagi banyak negara.

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan melekat pada setiap diri manusia secara kodrati, berlaku universal dan bersifat abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, masih banyak manusia yang dengan sengaja melakukan berbagai cara untuk mengakhiri kehidupannya sendiri maupun orang lain secara tidak alamiah. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan keyakinan setiap umat beragama yang percaya bahwa hanya Tuhan pemilik hidup ini dan berhak atas kehidupan manusia ciptaan-Nya, juga hanya Tuhan yang akan menentukan batas akhir kehidupan setiap manusia di dunia ini sesuai dengan kehendak-Nya

### ***B. Implikasi Penelitian***

Jika pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena biaya maupun karena rumah sakit yang lebih lengkap terlalu jauh, maka dapat dilakukan dua cara:

1. Menghentikan perawatan/ pengobatan, artinya membawa pasien pulang ke rumah.
2. Membiarkan pasien dalam perawatan seadanya, tanpa ada maksud melalaikannya, apalagi menghendaki kematiannya.

3. Umat Islam diharapkan tetap berpegang teguh pada kepercayaannya yang memandang segala musibah (termasuk menderita sakit) sebagai ketentuan yang datang dari Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA

Achadiat, Chrisdino, M. *Dinamika Etika dan hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Cet. I; Jakarta: EGC, 2007.

Akbar, Ali. *Euthanasia Dilihat Dari Hukum Islam*, Panji Masyarakat No.453.Th.XXVI, 21 Desember 1984.

Al-Bukhari. *Shahih Bukhary*, Juz V; Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1971.

Al-Syaukany. *Nail Al-Authar*, Jilid IX; Saudi Arabia: Idarah Al-Buhuts Al-Islamiyah, T.th.

Amr. Amir. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakrta: Widya Medika, 1999.

Arifin, Syamsul. *Menurut Pandangan Islam: Euthanasia Dilarang*, Kiblat No.18.Th.XXVII, Februari ke 1 1981.

Aseri, Akh. Fauzi. *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995

Audah, Abdul Al-Qadir. *As Tasyri' Al Jinairy Al Islamy*, Jilid I; Beirut Dar Al Kitab Al Arabiyu, Th.th.

----- . *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Muassasat ar-Risalat, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azar. *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Bertens, K.,. *Euthanasia Perdebatan yang Berkepanjangan, dalam Klipping LSI*, Edisi 8, Agustus 2000.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: Dipongoro; 2008.

Departemen Pendidikan Nasinal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Djazuli. *Fiqh Jinayat Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2000.

Echols, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Gramedia, 1978.

Forum Kedailan No. 4, 29 April 2001.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cet I; Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hanafi, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hardinal. *Euthanasia dan Pesentuhannya dengan Hukum Kewarisan Islam, Dalam Mimbar Hukum* No.6 Tahun VII, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.

*Harian Media Indonesia* 20 September 2004 rubrik kesehatan, <http://www.mediaindo.co.id>

Hasan, M., Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

James, Rachels. La fine della vita dalam Nadeak P. Gonzales, OFMCap. *Lebih Baik Mati? Menyorot Euthanasia*. Bina Media Perintis, Medan, 2004.

Karyadi, Petrus Yoyo. *Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

Khaeruman, Badri. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Khallaf, Abd Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.VIII; Al-Dar Al-Kuwaitiyyah, 1986.

Kode Etik Kedokteran Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit IDI, 1969.

Kode Etik kedokteran Islam, Terj. Sudibyo Soepardi, Cet. IV; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Moelyanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta: UGM, 1978.

-----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Terj. Seksi Hukum Pidana UGM, Cet VIII; Yogyakarta, 1971.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ohoiwutun, Y. A. Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Cet. I; Malang: Bayumedia, 2007.

Prakoso, Djoko. dan Djaman Andi Nirwanto. *Euthanasia Hak Asasi manusia dan hukum pidana*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Riduwan, *Metode Teknik Penulisan Tesis*, Cet. IV; Bandung: 2004.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa H. A Ali. Bandung: Al-Maarif, 1997

Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia, Ekletisisme, dan Pandangan Non Muslim*, Cet. I; Jakarta: Kolam Publishing, 2008.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Orientasi Kepustakaan Prektis*, Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2009.

Staf Pengajar Hukum Tata Negara dan Hak-Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Surbakti, Natangsa. *Euthanasia dalam Hukum Indonesia, Suatu Telaah Kefilsafatan Terhadap Eksistensi dalam Konteks Masyarakat Indonesia Modern, Dalam Jurnal Hukum*, Vol. I No. 1 FH. UMS Maret 1998.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Mesir: Dar Al-Qalam, 1966.

Ta'adi, Ns. *Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Jakarta: EGC, 2009.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ed. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, Cet.I; Jakarta: Gitamedia Press, 2006.

Tschchikvadse cs. Victor M., *The System of Socialist Law*, International Encyclopedia of Comparative Law, Tubingen, Mouton, The Hague, Paris, J.C. Mohr, Vol. II; Bab 2: Paul Siebeck, 1971.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, <http://www.yahoo.com>

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masailul Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2009.

Zallum, Abdul Qadim. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ Tubuh, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bungil, Jakarta: al Izzah, 1998.

Zuhdi, Masifuk. *Penderita AIDS Tidak Boleh Dieuthanasia, Dalam Mimbar Hukum*, Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hasriasman Rachmat Hasan, lahir pada tanggal 6 maret 1987, di Ujung Pandang, anak ke-3 dari 3 bersaudara, dari pasangan bapak Drs. H. Hasan, S.pd dan Ibu hj. Nurliah. Penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 1993 di SD Inpres Tetebatu I kecamatan pallangga kabupaten Gowa, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri I Pallangga dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri I Bajeng dan tamat pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar melalui hasil seleksi UMPTN.

Memiliki minat dalam hal seni yakni melukis tapi tidak pernah ikut dalam organisasi yang berhubungan dengan seni ataupun organisasi lainnya, karena tidak suka adanya keterikatan pada sebuah organisasi. Memiliki motto “ seseorang harus hidup dengan bahagia dan tidak menyesalinya ketika berakhir “ wassalamu Alaikum Wr. Wb.